



**ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEMAMPUAN
NELAYAN MENDAPATKAN MODAL USAHA
DI KABUPATEN PANGKEP**

=====
SKRIPSI
=====

*Skripsi Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan
Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Universitas Hasanuddin
Makassar*

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

Judul : Analisis Perbandingan Tingkat Kemampuan Nelayan
Mendapatkan Modal Usaha di Kabupaten Pangkep
Nama : MARLIANY WIDIANINGSI
Stambuk : L 241 01 027

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Ir. Sutinah Made, M.Si
NIP : 131 570 438


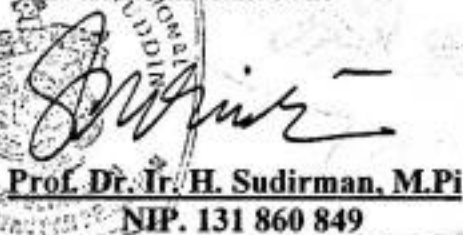
Pembimbing Anggota



Hamzah, S.Pi, M.Si
NIP. 132 296 014

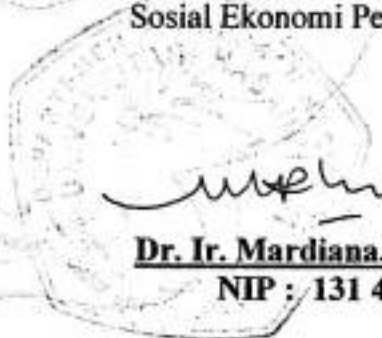
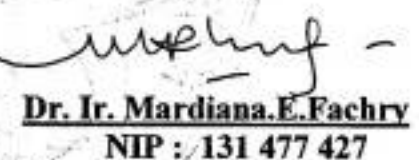
Diketahui oleh :

Dekan
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. H. Sudirman, M.Pi
NIP. 131 860 849

Ketua Program Studi
Sosial Ekonomi Perikanan



Dr. Ir. Mardiana E. Fachry
NIP : 131 477 427

Tanggal Pengesahan : Juni 2006



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa penulis kirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita umat Islam.

Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat Kemampuan Nelayan Mendapatkan Modal Usaha di Kabupaten Pangkep” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mempunyai banyak kendala dan hambatan, olehnya itu pantaslah kiranya jika penulis menundukkan kepala dan dengan rendah hati menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr.Ir. Mardiana E, Fachry** selaku Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian ini
2. Ibu **Dr. Ir. Sutinah Made, M.Si** (Pembimbing Utama) dan bapak **Hamzah S.Pi M.Si** (Pembimbing Anggota) yang telah banyak mengikhhlaskan tenaga, waktu dan fikirannya dalam membimbing penulis sejak awal penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa penulis kirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita umat Islam.

Skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Tingkat Kemampuan Nelayan Mendapatkan Modal Usaha di Kabupaten Pangkep" merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mempunyai banyak kendala dan hambatan, olehnya itu pantaslah kiranya jika penulis menundukkan kepala dan dengan rendah hati menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr.Ir. Mardiana E, Fachry** selaku Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian ini
2. Ibu **Dr. Ir. Sutinah Made, M.Si** (Pembimbing Utama) dan bapak **Hamzah S.Pi M.Si** (Pembimbing Anggota) yang telah banyak mengikhhlaskan tenaga, waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini

3. Para dosen dan asisten perikanan yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penulis selama di bangku kuliah, khususnya dosen Sosial Ekonomi Perikanan
4. A. Mangerangi (Lurah Pundata Baji) dan seluruh warga yang telah banyak memberikan bantuan dan fasilitas serta bimbingan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini
5. Teman-teman SOSEK Perikanan UNHAS Angkatan 2001

Tak pantaslah kiranya jika penulis tidak mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda Drs. Abd. Madjid (Alm), ibunda Nurliah Nurdin dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan penulis dan dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan berbagai nasehat-nasehatnya agar penulis kelak bisa jadi anak yang berbakti dan berguna. Semoga Tuhan memberikan penulis umur yang panjang agar kelak bisa membahagiakan mereka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri.

Makassar, Mei 2006

Marliany Widianingsi

ABSTRACTION

MARLIANY WIDIANINGSI. L 241 01 027. Comparison Analysis Mount The Fisherman Ability Get Capital Employed in Regency Pangkep. Under tuition of **SUTINAH MADE** as especial counsellor and **HAMZAH** as member counsellor.

Intention of this research is to know the way of fisherman teaming and which do not team in getting to access to get the capital employed, to know the pattern of credit exploiting accepted between fisherman teaming with the fisherman which do not team, to know the fluency of credit return of between fisherman teaming with the fisherman which do not team. and to know what there is the make-up of fisherman earnings teaming and fisherman which do not team after getting capital employed. This research is executed by during 2 month that at August month until September month 2005 which have place in Countryside of Pundata Wedge, Subdistrict of Labakkang and Subdistrict Pangkajene, Regency Pangkep.

This Location determination conducted intend the (Purposive) with the consideration that Chief of village of Pundata Wedge, fisherman teaming to get the capital from Program of Subdistrict Development (Economic PPK), Unit Produce (UEP),in Subdistrict Pangkajene get the capital from Economic Enableness of Coastal area Society (PEMP), while for the fisherman of which do not team the capital obtained come from Co-Operation of Wedge Ati. Sum up the responder for the fisherman of teaming consisted of 2 group Chief of village of Pundata Wedge amount to 10 people of while in Subdistrict Pangkajene amount to 5 Group (10 people. Fisherman which not team to amount to 10 people in Chief Of Village of Pundata Wedge, Subdistrict Labakkang.

Result of Research indicate that the fisherman which not team to get to access to obtain;get the capital by becoming member of co-operation of Wedge Ati of while fisherman teaming to get from Program of Subdistrict Development (PPK) And PEMP, fisherman teaming directional and better in exploiting of loan capital than fisherman which not team the, fisherman teaming more fluent not delay payment in return of loan capital than fisherman which not team, there[is the make-up of good earnings fisherman teaming after getting loan capital.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Nelayan	5
2.2 Kemampuan Nelayan	6
2.3 Kelompok Nelayan	6
2.4 Modal Usaha	9
2.5 Kelembagaan Ekonomi	9
2.5.1 Lembaga Ekonomi Formal	9
2.5.2 Lembaga Ekonomi Non Formal	20
2.6 Pendapatan	21
2.7 Kerangka Pikir	22
2.8 Hipotesis	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat	24
3.2 Jenis Penelitian	24
3.3 Teknik Pengambilan Responden	25
3.4 Teknik Pengambilan Data	26
3.5 Sumber Data	26
3.6 Analisis Data	26
3.7 Konsep Operasional	28
BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Keadaan Umum Lokasi	30
4.2 Gambaran Umum Responden	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Akses Modal	41
5.2 Pemanfaatan Kredit Nelayan	50
5.3 Kelancaran Pengembalian Kredit	51
5.4 Peningkatan Pendapatan Nelayan	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

61

6.2 Saran

61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Jumlah Responden Berdasarkan Sumber Modal	25
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pangkep	31
3.	Produksi Penangkapan Ikan Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pangkep	33
4.	Jenis dan Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Kabupaten Pangkep	34
5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur di Kabupaten Pangkep	35
6.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Pangkep	37
7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usaha Di Kabupaten Pangkep	38
8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga Responden di Kabupaten Pangkep	39
9.	Akses Terhadap Modal	41
10.	Peningkatan Pendapatan Nelayan Sebelum dan Setelah Mendapatkan Modal	54
11.	Tingkat Pendapatan Nelayan yang Tidak Berkelompok Sebelum Mendapat Kredit dari Koperasi	55
12.	Tingkat Pendapatan Nelayan yang Tidak Berkelompok Setelah Mendapat Kredit dari Koperasi	56
13.	Tingkat Pendapatan Nelayan yang Berkelompok Sebelum Mendapat Kredit dari PPK	57
14.	Tingkat Pendapatan Nelayan yang Berkelompok Setelah Mendapat Kredit dari PPK	57
15.	Tingkat Pendapatan Nelayan yang Berkelompok Sebelum Mendapat Kredit dari PEMP	58
16.	Tingkat Pendapatan Nelayan Tidak Berkelompok Setelah Mendapat Kredit dari Koperasi	59

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Diagram Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur	36
2.	Diagram Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
3.	Diagram Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usaha	39
4.	Diagram Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga	40

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Jenis dan Nilai Penyusutan Alat Nelayan Sebelum Mendapatkan Kredit	64
2.	Rekapitulasi Analisis Biaya Produksi Sebelum Mendapatkan Kredit	66
3.	Jenis dan Nilai Penyusutan Alat Nelayan Setelah Mendapatkan Kredit	68
4.	Rekapitulasi Analisis Biaya Produksi Setelah Mendapatkan Kredit	70
5.	Rekapitulasi Tingkat Pendapatan Nelayan	72
6.	Peningkatan Pendapatan Nelayan	75
7.	Hasil Perhitungan Uji-T	78

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sub sektor perikanan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki peran cukup strategis dalam perekonomian nasional, bahkan sub sektor ini merupakan salah satu sumber devisa negara yang penting. Perikanan bersifat dinamis dan multi dimensi berhubung karena usaha di bidang perikanan sangat ditentukan oleh komponen ekologis, kebudayaan, sosial dan ekonomi. Disamping itu, sistemnya sangat kompleks dilihat dari segi saling ketergantungan dan keterkaitan sumberdaya, kegiatan penangkapan dan budidaya. Pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan nasional, diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Harapan untuk menjadikan sub sektor ini sebagai pendukung dalam pencapaian tujuan tersebut didasarkan pada potensi perikanan laut yang dimiliki.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu propinsi di kawasan timur Indonesia yang memiliki letak geografis yang sangat strategis sebagai daerah potensial produksi perikanan. Bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan khususnya yang ada di daerah sekitar pesisir, penangkapan dan pemanfaatan hasil laut merupakan salah satu usaha ekonomi yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Orang yang mencari nafkah dengan melakukan kegiatan tersebut di laut atau perairan umum lainnya disebut nelayan.

Nelayan sebagai salah satu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, merupakan lapangan pekerjaan yang cukup baik bagi masyarakat pesisir. Lapangan kerja sebagai nelayan adalah wujud dari sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungannya guna memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan hidupnya. Sebagian nelayan berhimpun dalam suatu kelembagaan nelayan, yaitu dengan membentuk kelompok nelayan dimana lembaga ini merupakan wadah bekerja sama dan wadah pembinaan bagi nelayan untuk mengembangkan usahanya.

Pembentukan kelompok nelayan ini diharapkan mampu membantunya dalam meningkatkan kualitas SDM dan untuk membantu mendapatkan modal yang dibutuhkan dalam kegiatan penangkapan yang jumlahnya besar. Modal tersebut berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman (kredit). Untuk mendapatkan modal, nelayan yang berkelompok memperoleh modal pinjaman (kredit) dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Sementara nelayan yang tidak berkelompok (sendiri) mendapatkan modal pinjaman dari Koperasi Baji Ati. Dari sumber modal itu dilihat perbedaan antara nelayan yang berkelompok dengan nelayan yang tidak berkelompok (sendiri) dalam mengakses modal, pemanfaatan kredit, kelancaran pengembalian kredit dan peningkatan pendapatan nelayan setelah menerima pinjaman modal.

Pemberdayaan perikanan rakyat (nelayan) melalui dukungan permodalan merupakan suatu solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Atas dasar pertimbangan inilah penelitian dengan judul "**Analisis Perbandingan Tingkat Kemampuan Nelayan Mendapatkan Tambahan Modal Usaha di Kabupaten Pangkep**" dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara nelayan yang berkelompok dengan nelayan yang tidak berkelompok dalam akses untuk memperoleh tambahan modal usaha
2. Bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima antara nelayan yang berkelompok dengan nelayan yang tidak berkelompok.
3. Bagaimana kelancaran pengembalian kredit antara nelayan yang berkelompok dengan nelayan yang tidak berkelompok.
4. Apakah ada peningkatan pendapatan nelayan yang berkelompok dengan yang tidak berkelompok setelah mendapatkan modal usaha.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui cara nelayan yang berkelompok dan yang tidak berkelompok dalam akses untuk memperoleh tambahan modal usaha.
2. Untuk mengetahui pola pemanfaatan kredit yang diterima antara nelayan yang berkelompok dengan nelayan yang tidak berkelompok.
3. Untuk mengetahui kelancaran pengembalian kredit antara nelayan yang berkelompok dengan nelayan yang tidak berkelompok.
4. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan pendapatan nelayan yang berkelompok dan nelayan yang tidak berkelompok setelah mendapatkan modal usaha.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Memberi informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam penetapan kebijakan terutama yang berkaitan dengan kemampuan nelayan dalam mendapatkan modal usaha.
2. Memberi informasi dan bahan masukan bagi nelayan dalam mengembangkan usaha sesuai kemampuan nelayan dalam mendapatkan modal usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nelayan

Nelayan adalah orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya. Masyarakat nelayan ditinjau dari aspek ekonomi memiliki stratifikasi sebagai berikut :

1. Nelayan kaya, yaitu nelayan yang mempunyai kapal yang memperkerjakan nelayan lain sebagai nelayan pandega (sawi).
2. Nelayan kaya, yaitu nelayan yang mempunyai kapal tetapi dia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal.
3. Nelayan sedang, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokok dari bekerja sebagai nelayan, mempunyai perahu tanpa memperkerjakan tenaga dari luar keluarga.
4. Nelayan miskin, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga harus ditambah lagi dengan bekerja lain untuk kebutuhannya beserta istri dan anaknya.
5. Nelayan pandega (sawi), yaitu nelayan yang tidak mempunyai perahu sehingga kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan bekerja sebagai awak kapal (Arief A, 2002).

2.2 Kemampuan Nelayan

Tingkat kemampuan diukur berdasarkan 5 jurus kemampuan, yaitu :

1. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal.
2. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain
3. Kemampuan pemupukan modal
4. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga.
5. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi (Masri, 2001).

2.3 Kelompok Nelayan

Kelompok nelayan adalah kumpulan nelayan yang terikat secara non formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan, keakraban, kepentingan bersama, dan saling mempercayai untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok nelayan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : saling mengenal baik antara anggotanya, akrab dan saling percaya serta memiliki kesamaan seperti kebiasaan, pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status sosial maupun ekonomi, bahasa, pendidikan serta ekologi (Anonim, 1992).

Manfaat yang bisa dicapai dari adanya kelompok baik di dalam maupun di luar satuan organisasi menurut Hammando (2002), antara lain :

1. Kelompok merupakan alat perjuangan bagi anggotanya.
2. Kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas.
3. Kelompok lebih baik dari pada perorangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut orang banyak.

4. Anggota kelompok dapat memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pengambilan keputusan.
5. Kelompok dapat mengendalikan dan mendisiplinkan anggotanya dibanding dengan mereka yang tidak masuk dalam kelompok.
6. Kelompok membantu menangkis pengaruh-pengaruh negatif dari meningkatnya organisasi yang semakin besar.
7. Kelompok adalah fenomena alami dalam organisasi. Perkembangannya yang spontan tidak dapat dihalangi dan dibutuhkan oleh anggota sebagai alat pencapaian tujuan.

Menurut Hammando (2002), terbentuknya suatu kelompok dapat dilihat dari beberapa teori sebagai berikut :

1. *Teori Kedekatan*. Teori ini menyatakan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan seseorang dan daerahnya.
2. *Teori G. Hommans*. Teori ini didasarkan atas aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi dan sentiment-sentiment. Tiga hal ini saling berhubungan secara langsung.
3. *Teori Keseimbangan*. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada orang lain karena didasarkan atas kesamaan sikap didalam menyikapi satu tujuan yang relevan satu sama lain.
4. *Teori Pertukaran*. Teori ini menyatakan bahwa interaksi dan susunan hadiah biaya dan hasil-hasil yang berasal dari interaksi akan mendorong timbulnya

kebutuhan. Sementara itu biaya akan menimbulkan kekhawatiran, kelelahan dan kesusahan.

Alasan-alasan nelayan berkelompok yaitu meningkatkan pendapatan, fasilitas atau bantuan, meningkatkan pengetahuan dan memupuk kerja sama antara anggota dengan pengurus serta kelompok dengan pihak lain (Masri, 2001).

Kelompok nelayan digunakan sebagai perantara, penyampaian materi baru kepada anggota melalui kerja kelompok, sehingga anggota dapat menguasai suatu materi. Dalam komunitas masyarakat pesisir terdapat kelompok nelayan yang terdiri atas ponggawa dan sawi (Arief A, 2002).

1. Akses Mendapatkan Modal Atau Kredit

Kelompok nelayan merupakan suatu kesatuan unit usaha nelayan untuk mewujudkan kerja sama dalam mencapai skala ekonomi yang menguntungkan. Kelompok nelayan berperan sebagai tempat bagi nelayan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan sumber pemberi dana penyedia sarana produksi, sebagai fasilitator antara nelayan dengan pemberi modal atau kredit (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2005)

2. Pemanfaatan Kredit

Kelompok nelayan merupakan wadah bagi setiap anggotanya untuk berinteraksi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dalam berusaha agar lebih baik dan menguntungkan. Kelompok nelayan berperan sebagai pemantau pemanfaatan dana pinjaman baik dari nelayan dengan anggota maupun kelompok dengan pengelola dana pinjaman, sebagai pendamping dalam pemanfaatan kredit dan

membantu dalam menentukan pola usaha nelayan yang menguntungkan (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2003)

3. Pengembalian Kredit

Persyaratan perolehan kredit bagi nelayan selalu dikaitkan dengan faktor resiko tinggi karena selalu bermasalah pada saat pengembalian kredit. Dari masalah ini, kiranya dapat diatasi dengan sistem kebijakan pendampingan, dimana pemberi dana pinjaman bertindak sebagai orang yang dapat membantu dengan cara pembuatan analisa kelayakan usaha melalui penjelasan kepada para anggota kelompok nelayan dengan pemberi kredit, sebagai pemberi perlindungan dan jaminan kepada pemberi dana pinjaman (Dianthani D, dkk, 2003)

2.4 Modal Usaha

Modal usaha adalah seluruh kekayaan baik berupa uang maupun barang yang merupakan faktor terpenting untuk mendirikan suatu usaha. Sumber modal dapat berupa modal pribadi atau modal hasil pinjaman dari orang lain dan badan-badan atau instansi seperti bank, koperasi dan sebagainya (Arief A, 2002).

2.5 Kelembagaan Ekonomi

2.5.1 Lembaga Ekonomi Formal

2.5.1.1 Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-undang No. 25/1992, pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas Koperasi.


Menurut pasal 3 UU No. 25/1992, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Paswir R, 2000).

Prinsip-prinsip Koperasi adalah :

1. Adanya pengaturan tentang kepemilikan koperasi yang berdasarkan keadilan.
2. Adanya ketertarikan atau partisipasi berbagai golongan masyarakat untuk bekerja sama.
3. Adanya ketertarikan atau partisipasi berbagai golongan masyarakat dalam melaksanakan dan usaha Koperasi.
4. Adanya ketertarikan tentang pelaksanaan yang didasarkan berdasarkan keadilan sosial yang bersifat, sesuai dengan perkembangan dan Koperasi telah mengalami (Paswir R, 2000).

Fungsi dan peran Koperasi Indonesia dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- 
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Baswir R, 2000).

Cara meminjam modal ke koperasi yaitu calon peminjam datang ke kantor koperasi untuk mengajukan permohonan kredit, kadang-kadang peminjam dikenakan biaya materai dan biaya administrasi sekitar 5 % dari jumlah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian selama 10 minggu. Bunga yang dikenakan berkisar antara 1 % per minggu sampai 8 % per bulan.

2.5.1.2 Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Sebagaimana program anti kemiskinan lainnya, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dirancang khusus untuk mengkoordinasikan berbagai program anti kemiskinan yang telah ada secara terpadu. Kebijakan pemberdayaan melalui program ini dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan kecamatan dalam pembangunan, yaitu menggerakkan peran serta aktif masyarakat pedesaan yang dikoordinasikan kecamatan melalui forum koordinasi pembangunan dalam kerangka administrasi pembangunan.

PPK dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan dengan cakupan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. Hal tersebut sesuai dengan buku manualm Teknis Program PPK (Anonim, 1998) dijelaskan bahwa PPK

bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian modal untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana yang mendukung kegiatan sosial pedesaan, dengan tekanan pada :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan melestarikan kegiatan sosial ekonomi masyarakat pedesaan
- b. Meningkatkan kegiatan usaha, lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga dan aparat di tingkat desa dan di tingkat kecamatan untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.

Untuk menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, maka pengelolaannya dibutuhkan suatu organisasi yang dapat menjaga pelaksanaan program secara berkesinambungan, menjamin keamanan, akuntabilitas serta penyaluran dana baik dari KPKN (Kantor Pembendaharaan Kas Negara) dari kecamatan ke desa melalui TPK (Tim Pengelola Kegiatan), pendokumentasian atas setiap kegiatan juga dibutuhkan serta dalam rangka menjamin pencatatan maupun pengarsipannya. Untuk itu dibentuk suatu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berkedudukan di kecamatan yang telah terpilih dan terbentuk dalam Musyawarah Antara Desa II.

Kegiatan perluasan kesempatan dan peluang usaha yang dilakukan PPK diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan ruang lingkup kegiatannya yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk mengoperasionalkan atau mengelola kegiatan ini, hal-hal prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Kemudahan, artinya setiap pengelolaan dana pinjaman bergulir dilakukan secara sederhana dan bisa dimengerti oleh masyarakat luas. Selain itu perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin yang akan mengembangkan peluang usaha untuk mengajukan dan memperoleh persetujuan pemanfaatan dana pinjaman bergulir.
2. Terlembagakan, artinya tata cara dan prosedur dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir diupayakan agar melembaga menjadi suatu sistem yang baku sebagai hasil kesepakatan masyarakat.
3. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan dana dan pengambilan keputusan mengenai pengelolaan kegiatan dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan upaya menumbuhkan dan meningkatkan sumberdaya dan kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.
4. Pengembangan, artinya setiap keputusan pengelolaan dana modal usaha harus dapat mendorong tercapainya pengembangan dana modal usaha dan meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
5. Akuntabilitas, artinya setiap pengelolaan dana dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sejak tahap sosialisasi perlu dijelaskan kepada masyarakat tentang syarat minimal kelompok yang dapat mengajukan pinjaman untuk kegiatan UEP, maupun syarat kelompok yang layak menerima pinjaman.
2. Terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang memenuhi syarat minimal dan akan mengajukan kegiatan UEP serta telah diputuskan sebagai salah satu usulan desa ke Musyawarah Antara Desa, perlu diberikan pelatihan untuk mempersiapkan pemenuhan kriteria sebagai kelompok yang layak menerima pinjaman.
3. Setelah memenuhi syarat sebagai kelompok yang layak menerima pinjaman, dilanjutkan dengan penyusunan usulan oleh kelompok dibantu oleh Tim Penulis Usulan.
4. Penyusunan usulan kegiatan UEP telah menyertakan rencana kegiatan / usaha anggota atau rencana kegiatan / usaha bersama yang didalamnya telah memuat rencana biaya yang dibutuhkan, serta penilaian atau penghitungan kelayakan usaha kelompok atau usaha bersama.
5. Usulan kegiatan UEP, selanjutnya diperiksa atau dinilai kelayakan kelompok pengusul dan kemanfaatannya oleh Tim Verifikasi.
6. Hasil penilaian kelayakan manfaat usulan kegiatan dan kelompok yang berupa rekomendasi Tim Verifikasi dijadikan dasar penentuan oleh Musyawarah Antar Desa untuk menentukan peringkat usulan yang akan didanai oleh PPK.

Peringkat usulan kegiatan disusun dengan membahas dan mengkompetisikan secara sehat dari semua usulan desa-desa, baik berupa prasarana, UEP, kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang kesehatan maupun kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, kecuali usulan kegiatan simpan pinjam perempuan.

2.5.1.3 Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3)

LEPP-M3 adalah lembaga ekonomi yang dibentuk dalam rangka pembangunan modal usaha dimana pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Konsultan Manajemen (KM) setempat.

Dahuri (2001) mengemukakan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, saat ini telah dikembangkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan prinsip *to help them to help themselves*. Kegiatan PEMP meliputi pengembangan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, pengembangan jaringan dan kelembagaan sosial ekonomi, peningkatan fasilitas masyarakat dalam akses permodalan serta pengembangan kemampuan pemerintah local dan masyarakat.

Menurut Anonim (2003), tujuan program PEMP yaitu :

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan , pelaksanaan, pengawasan, pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang didampingi dengan pengembangan kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, dan

pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir.

- 2) Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang terkait dengan sumberdaya perikanan dan kelautan.
- 3) Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
- 4) Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam mendukung pembangunan wilayahnya.
- 5) Mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipatif dan transparan dalam kegiatan masyarakat.

Menurut Anonim (2003) sasaran program PEMP yaitu :

- 1) Secara umum kelompok sasaran program PEMP adalah masyarakat pesisir yang kurang berdaya (miskin), menetap di daerah pantai dan pulau-pulau kecil.
- 2) Masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, pengolah ikan, usaha jasa perikanan dan pariwisata bahari serta usaha atau kegiatan yang terkait dengan perikanan dan kelautan.

2.5.1.4 Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perjanjian kredit adalah persetujuan pinjam-meminjam secara tertulis antara bank (sebagai kreditor) dimana pihak lain (sebagai debitur/nasabah). (Arbi S, 2003)

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Cara-cara untuk mendapatkan pinjaman modal dari Bank yaitu :

- a. Pengajuan berkas-berkas. Pihak pemohon mengajukan permohonan kredit dengan membuat proposal yang berisi :
 - Latar belakang perusahaan, perkembangan perusahaan dan relasi-relasinya dengan pihak pemerintah dan swasta
 - Maksud dan tujuan pengajuan kredit
 - Besarnya kredit dan jangka waktu
 - Cara pemohon mengembalikan kredit
 - Jaminan kredit
 - Akte notaris
 - Tanda daftar perusahaan
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
 - Bukti diri dari pimpinan perusahaan
 - Foto copy sertifikat jaminan
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
 - c. Penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam
 - d. Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan
 - e. Kegiatan perbaikan berkas apabila ada kekurangan-kekurangan setelah melakukan pemeriksaan ke lapangan
 - f. Keputusan kredit
 - g. Penandatanganan perjanjian kredit
 - h. Realisasi kredit dengan membuka rekening atau tabungan di bank yang bersangkutan
 - i. Penyaluran dana (Kasmir, 2003)

2.5.1.5 Pegadaian

Tugas pokok pegadaian adalah memberikan bantuan dana khusus untuk masyarakat kecil dengan menerapkan teknik pegadaian yaitu dengan hukum gadai. Suku bunga yang dikenakan sebesar 5 % per bulan dengan jangka waktu selama 6 bulan dengan jaminan berupa benda-benda bergerak dan tak bergerak. Prosedur meminjam dana dari Pegadaian yaitu :

1. Aplikasi

Calon peminjam datang ke kantor Pegadaian, bagi yang belum mengerti teknik pengajuan pinjaman dari Pegadaian dapat meminta informasi, kemudian mengisi aplikasi yang tersedia untuk meminjam uang.

2. Penaksiran Barang

Barang yang akan digadaikan ditaksir oleh juru taksir pihak Pegadaian, kemudian hasil taksiran itu diberitahu kepada pihak calon peminjam, sebagai acuan untuk jumlah besarnya pinjaman yang dimungkinkan untuk diperoleh.

3. Negosiasi jumlah pinjaman/jangka waktu pengembalian

Atas dasar jumlah taksiran harga barang yang akan digadaikan dinegosiasikan jumlah pinjaman yang layak sesuai ketentuan yang berlaku pada Perum Pegadaian dan jangka waktu pinjaman. Dalam proses ini ditentukan besarnya sewa uang pinjaman yang harus menjadi kewajiban pihak orang yang menggadaikan barangnya.

4. Penyerahan barang yang digadaikan

Setelah jumlah pinjaman disepakati dan jangka waktu disetujui, dilakukan pengikatan gadai, dan barang yang digadaikan diserahkan kepada pihak Perum Pegadaian oleh pemilik barang sebagai peminjam uang. Perum Pegadaian menerbitkan tanda terima atas barang.

5. Pencairan dana pinjaman

Pihak yang meminjam uang dengan gadai mencairkan uang pinjaman pada loket yang telah disediakan.

6. Penyetoran pinjaman

Bilamana nasabah gadai tersebut telah mempunyai uang dan bermaksud menebus barang yang digadaikannya, dapat segera dilakukan walaupun waktu gadainya belum selesai. Uang pelunasan yang biasa disebut dengan tebusan gadai dapat langsung disetorkan ke Perum Pegadaian.

7. Penerimaan barang gadai

Setelah uang tebusan disetorkan dapat langsung mengambil barang yang digadaikan dengan menunjukkan bukti pelunasan dan bukti tanda terima barang.

8. Pelelangan barang gadai

Dalam hal sampai akhir jangka waktu gadai yang telah disepakati pihak nasabah yang menggadaikan barangnya belum juga menebus barangnya, pihak Perum Pegadaian akan segera melelang barang tersebut. Hasil lelang tersebut diberitahukan kepada nasabah, pihak Perum Pegadaian memperhitungkan dari hasil lelang itu uang pinjaman berikut sewa modal (bunga) dan biaya administrasi pelelangan, sisa hasil uang lelang diserahkan kepada nasabah (Arbi S, 2003).

2.5.2 Lembaga Ekonomi NonFormal

2.5.2.1 Ponggawa

Nelayan (sawi) yang berada dalam satu unit tangkapan membuat prosedur berupa usulan secara lisan besarnya jumlah dana dan penetapan kesepakatan aturan pinjaman. Setelah terjadi kesepakatan maka dana yang diminta dapat dicairkan

(diberikan). Dana yang dipinjam, dikembalikan dengan sistem mencicil yaitu uang hasil tangkapan diberikan kepada ponggawa (Made S, Sri S A dan Ilmawaty I, 2004).

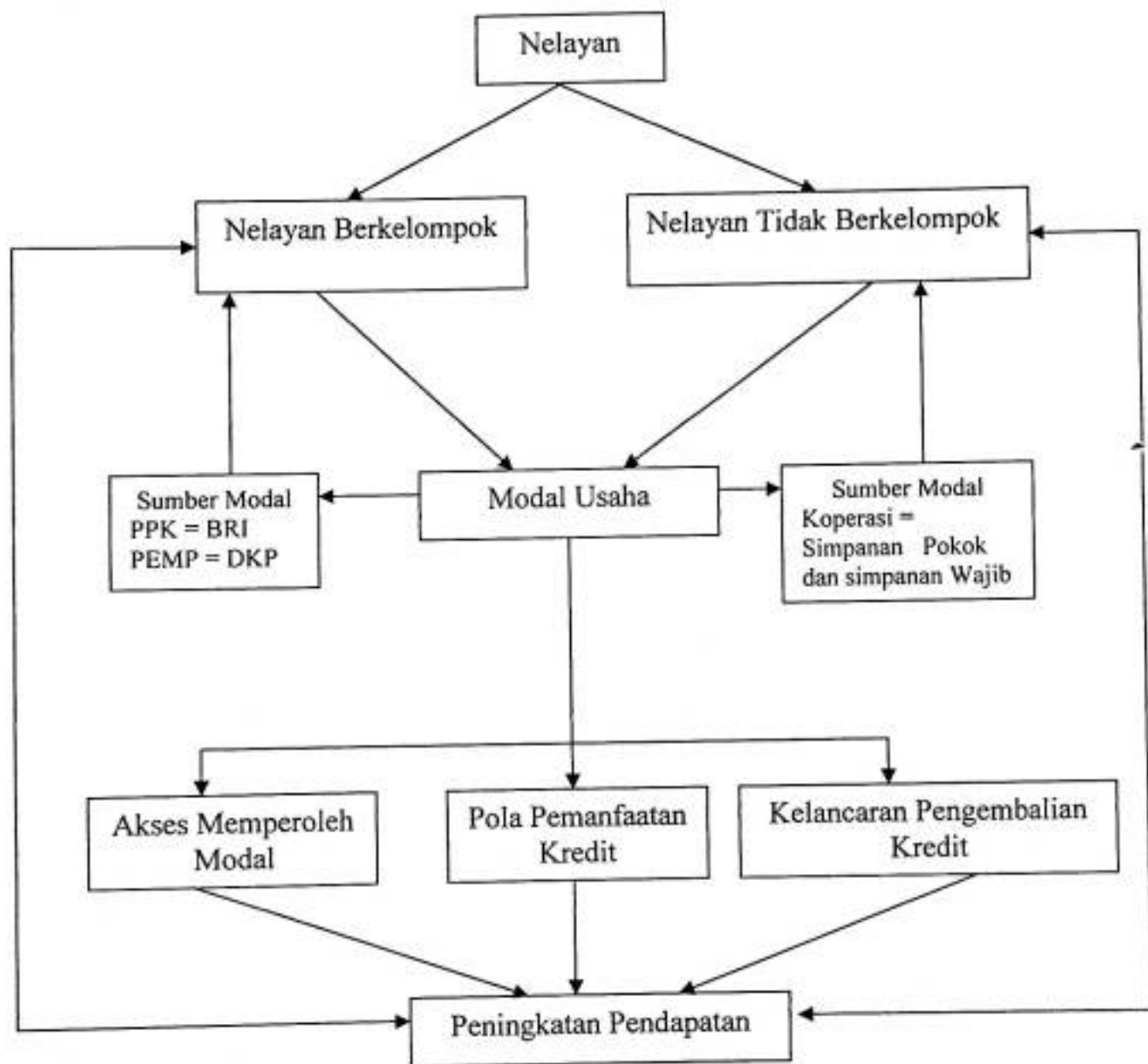
2.6 Pendapatan

Soekartawi (2001) menyatakan bahwa pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan total pengeluaran biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani yang bersangkutan pendapatan petani dapat berupa uang tunai atau barang.

Sukirno (2002) menyatakan bahwa pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk dalam suatu perekonomian. Selanjutnya Soekartawi (1995) ada beberapa pengertian yang perlu diperhatikan dan dibedakan secara cermat dalam menganalisa pendapatan petani yaitu:

- 1) Pendapatan kotor usaha tani (Gross farm income) yaitu nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu mencakup produk yang dijual, konsumsi keluarga petani, dipakai bibit makan ternak, untuk pembayaran uang, disimpan digudang. Pendapatan kotor = nilai produksi (Value production).
- 2) Pengeluaran total usaha tani (Total farm expencees) yaitu nilai dari semua masukan (input) yang dipakai untuk produksi, tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Pengeluaran total usaha tani dan biaya produksi.
- 3) Pendapatan bersih usaha tani (Net farm income) yaitu selisih antara pendapatan kotor dengan pengeluaran total atau pendapatan kotor dikurangi biaya tetap dan biaya variabel.

2.6 Kerangka Pikir



Nelayan merupakan orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya. Nelayan dapat dibagi atas dua yaitu nelayan yang berkelompok dan nelayan yang tidak berkelompok (sendiri). Nelayan yang berkelompok maupun yang tidak

berkelompok mendapatkan modal usaha dari PEMP dan PPK, sumber modal PEMP yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan PPK yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Nelayan yang tidak berkelompok mendapatkan modal dari Koperasi, sumber modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

Indikator-indikator yang digunakan dalam melihat kemampuan nelayan mendapatkan modal usaha yaitu dengan melihat perbedaan dalam akses memperoleh modal, pola pemanfaatan kredit, kelancaran pengembalian kredit dan peningkatan pendapatan setelah mendapatkan kredit.

2.7 Hipotesis

1. Nelayan yang tidak berkelompok lebih baik dalam mendapatkan akses untuk memperoleh tambahan modal usaha dari pada nelayan yang berkelompok.
2. Pola pemanfaatan kredit yang diterima nelayan yang berkelompok lebih baik dari pada nelayan yang tidak berkelompok.
3. Kelancaran pengembalian kredit yang berkelompok lebih baik (tidak menunggak) daripada nelayan yang tidak berkelompok.
4. Terdapat peningkatan pendapatan nelayan baik nelayan yang berkelompok maupun nelayan tidak berkelompok setelah mendapatkan modal usaha.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Agustus sampai bulan September 2005 yang bertempat di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang dan di Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (Purposive) dengan pertimbangan bahwa pada Kelurahan Pundata Baji, nelayan yang berkelompok mendapatkan modal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui Unit Ekonomi Produksi (UEP), dan di Kecamatan Pangkajene mendapatkan modal dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), sedangkan untuk nelayan yang tidak berkelompok, modal yang diperoleh berasal dari Koperasi Baji Ati.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun M, 1995) kemudian melakukan analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

3.3 Teknik Pengambilan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan penangkap kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) yang berkelompok yang diambil dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sedangkan nelayan yang tidak berkelompok dari Koperasi Baji Ati. Pengambilan responden dalam penelitian ini dengan cara Cluster Random Sampling (Singarimbun M, 1995) yaitu mengelompokkan sampel dalam nelayan yang berkelompok dengan nelayan yang tidak berkelompok. Jumlah responden yaitu 30 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Jumlah Responden Berdasarkan Sumber Modal

	Uraian			Total
	Yang Berkelompok		Yang Tidak Berkelompok	
Sumber Modal	PPK	PEMP	Koperasi	
Jumlah Nelayan (Org)	10	10	10	30
Persentase	33,33	33,33	33,34	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa responden terdiri dari nelayan yang berkelompok dan tidak berkelompok. Nelayan yang berkelompok yang memperoleh bantuan modal dari PPK terdiri dari 2 kelompok (10 orang) dan yang memperoleh bantuan modal dari PEMP terdiri dari 5 kelompok (10 orang). Nelayan yang tidak berkelompok yang memperoleh modal dari koperasi berjumlah 10 orang.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah :

1. Observasi, yaitu teknik pengambilan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan tidak langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data dan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan.

3.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :

1. Data primer, data yang diperoleh langsung di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara dengan nelayan dan pengurus kelompok nelayan.
2. Data sekunder, yaitu data yang terkait dengan penelitian yang diperoleh dari buku, dokumentasi pada instansi atau lembaga yang terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep.

3.6 Analisis Data

Untuk menjawab semua permasalahan digunakan analisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif (Singarimbun M, 1995). Untuk menjawab permasalahan keempat digunakan rumus (Soekartawi, 1995) sebagai berikut :

$$Pd = TR - TC$$

Dimana :

Pd = Pendapatan Usaha tani

TR = Total Revenue (Total penerimaan)

TC = Total cost (Total biaya)

- Untuk melihat perbedaan yang berarti (*signifikan different*) antara kedua rata-rata pendapatan nelayan digunakan Uji Hipotesis Perbedaan Dua Rata-Rata yaitu :

Ho : $\mu_1 = \mu_2$ artinya tidak ada perbedaan yang signifikan

Ha : $\mu_1 \neq \mu_2$ artinya ada perbedaan yang signifikan

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \quad (\text{Sudjana dalam Suwandi, 2002})$$

dimana

- \bar{x}_1 = rata-rata pendapatan nelayan sebelum mendapatkan modal usaha
- \bar{x}_2 = rata-rata pendapatan nelayan sesudah mendapatkan modal
- S_1^2 = simpangan baku pendapatan nelayan sebelum mendapatkan modal
- S_2^2 = simpangan baku pendapatan nelayan sesudah mendapatkan modal
- n_1 = Jumlah sampel nelayan sebelum mendapatkan modal
- n_2 = jumlah sampel nelayan setelah mendapatkan modal

Kriteria :

Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak

3.7 Konsep Operasional

1. Kemampuan nelayan adalah kekuatan-kekuatan yang terdapat didalam maupun di luar lingkungan nelayan yang akan menentukan perilaku nelayan, untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan nelayan. Yaitu kemampuan mengakses modal, memanfaatkan modal yang dipinjamkan dan cara pengembalian modal yang dipinjam
2. Nelayan yang berkelompok adalah nelayan yang membentuk suatu kumpulan yang terdiri dari 10 orang atau lebih yang saling berinteraksi, yang memperoleh modal pinjaman dari PEMP dan PPK.
3. Nelayan yang tidak berkelompok adalah nelayan yang hanya terdiri 1 orang yang memperoleh modal pinjaman dari koperasi Baji Ati.
4. Akses nelayan adalah kemampuan nelayan dalam mendapatkan modal usaha.
5. Nelayan adalah orang yang bermata pencaharian sebagai penangkap kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*).
6. Modal usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan usaha berupa pinjaman uang . Nelayan yang tidak berkelompok mendapatkan modal pinjaman sebesar Rp 2.500.000 dari koperasi Baji Ati. Nelayan yang berkelompok mendapatkan modal pinjaman dari PPK sebesar Rp 2.500.000 dan PEMP sebesar Rp 2.000.000.
7. PPK adalah Program Pengembangan Kecamatan yang memberikan bantuan modal berupa uang sebesar Rp 25.000.000 kepada tiap kelompok nelayan.

8. PEMP adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang diberikan kepada kelompok nelayan untuk meningkatkan bantuan modal usaha dari DKP yang bersumber dari dana subsidi BBM.
9. KMP adalah kelompok masyarakat yang terpilih untuk mendapatkan dana ekonomi produktif masyarakat dalam program PEMP.
10. TPD adalah Tenaga Pendamping Desa yang diikutsertakan pada program PEMP dalam proses pendampingan kelompok masyarakat pemanfaat.
11. LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina) adalah lembaga ekonomi yang dibentuk dalam rangka pembangunan modal usaha dimana pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Konsultan Manajemen (KM) setempat.
12. Pendapatan nelayan adalah keseluruhan penerimaan dari hasil tangkapan nelayan dikurang seluruh biaya yang dikeluarkan nelayan setiap bulan atau 20 trip.

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi

4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan kepulauan) terletak antara 11° BT dan $4^{\circ}40'$ LS sampai 8° LS atau terletak di pesisir pantai Barat Sulawesi Selatan yang merupakan suatu daerah yang berdimensi tiga meliputi daratan rendah, daratan tinggi dan kepulauan dengan luas wilayah $1.112,29 \text{ Km}^2$, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Madura, Pulau Nusa Tenggara dan pulau Bali

Berdasarkan letak teritorial ini, maka kabupaten Pangkep memiliki letak strategis untuk perkembangan kegiatan ekonomi karena memiliki 2 jalur perhubungan darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten atau ibukota propinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan jalur laut selain digunakan untuk hubungan di dalam propinsi Sulawesi Selatan juga digunakan untuk hubungan antar keluar propinsi Sulawesi Selatan. Selain itu letak kabupaten Pangkep juga dekat dengan ibu kota propinsi Sulawesi Selatan (Makassar) sehingga untuk pemasaran hasil-hasil bumi dari Kabupaten Pangkep sangat mudah.

Pemerintah kabupaten Pangkep menaungi 12 wilayah kecamatan yang terdiri atas 9 kecamatan di daratan dan 3 kecamatan di kepulauan. Dari ke 12 mil kecamatan tersebut terdapat 100 desa/kelurahan yang terbagi menjadi 36 kelurahan dan 64 desa.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk kabupaten Pangkep dari 12 wilayah kecamatan tersebut berjumlah 277.935 jiwa. Dari jumlah tersebut ada 3 kecamatan yang tinggi jumlah penduduknya yaitu kecamatan Labakkang berjumlah 39.707 jiwa, kecamatan Pangkajene berjumlah 36.182 jiwa dan kecamatan Bungoro berjumlah 32.974 jiwa. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah kecamatan Tondong Tallasa berjumlah 8.649 jiwa.

Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yakni 145.689 jiwa penduduk perempuan dan 132.246 jiwa penduduk laki-laki. Jumlah penduduk berdasarkan jumlah perkecamatan di kabupaten Pangkep dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pangkep

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)
1.	Labakkang	39.923
2.	Pangkajene	36.366
3.	Bungoro	34.468
4.	Ma'rang	28.267
5.	Minasa Te'ne	29.281
6.	Liukang Tuppabiring	27.656
7.	Segeri	20.237
8.	Balocci	15.770
9.	Liukang Tangaya	15.305
10.	Mandalle	12.869
11.	Liukang Kalmas	11.042
12.	Tondong Tallasa	8.707
Total		277.935

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2004

4.1.3 Topografi dan Iklim

Kabupaten Pangkep terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan yang terdiri atas dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73.721 ha, membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri atas persawahan, tambak, rawa-rawa dan empang. Sedangkan daerah pegunungan dengan ketinggian 100 - 1000 m di atas permukaan air laut terletak di sebelah timur batu cadas dan sebagian mengandung batu bara serta berbagai jenis batu marmer. Temperature udara berada pada kisaran 21°C - 31°C atau rata-rata $26,40^{\circ}\text{C}$. Keadaan dingin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Tempat kontrol keadaan curah hujan berada di stasiun Tabo-Tabo, Leang Lonrong dan stasiun Segeri. Pada tahun 2003 curah hujan tertinggi mencapai 709 atau 127 hari hujan berdasarkan catatan dari stasiun Leang Lonrong dengan kelembaban udara yang tidak merata.

4.1.4 Potensi dan Strategi Pembangunan Perikanan

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang cukup potensial untuk pengembangan di bidang perikanan terutama perikanan laut. Berdasarkan data total produksi perikanan laut di Kabupaten Pangkep pada tahun 2003 sebesar 7.050 ton produksi menurut jenis ikan yang ditangkap di kabupaten Pangkep disajikan pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3 : *Produksi Penangkapan Ikan Laut menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pangkep*

No	Jenis Ikan	Produksi thn 2000	Produksi thn 2001	Produksi thn 2002	Produksi thn 2003
1	Peperek	161,3	123,1	123,1	61,8
2	Manyung	32,3	59,6	59,6	69,9
3	Gerot-Gerot	213,7	171,2	171,2	160,3
4	Ikan Merah	125,3	118,4	118,4	168,7
5	Kerapu	-	-	-	6,6
6	Lencam	95,9	94,9	94,9	-
7	Kakap	-	-	-	5,5
8	Cucut	-	-	-	11,8
9	Pari	32,3	22,3	22,3	73,6
10	Alu-Alu	59,6	94,8	94,8	-
11	Layang	1610,8	1621,6	1190,8	539,5
12	Selar	426,6	326,5	423,8	184,1
13	Kuwe	121,9	133,2	402,9	186,3
14	Tetengkek	173,9	186,6	258,3	-
15	Tenggiri Papan	78,0	74,4	11,7	19,1
16	Belanak	78,7	45,3	19,1	52,8
17	Sebelah	-	-	4,0	-
18	Teripang	-	-	10,8	8,8
19	Ekor kuning	58,2	18,0	27,5	10,1
20	Tembang	1740,2	1712,6	1564,4	825,5
21	Lemuru	513,9	447,3	642,6	368,9
22	Kembung	2582,6	2739,7	2131,7	1654,9
23	Gulama	112,5	128,5	65,521	87,3
24	Cakalang	557,0	628,5	655,8	372,6
25	Ikan campuran	356,0	246,2	380,9	253,5
26	Rajungan	506,0	672,1	812,5	770,2
27	Udang Putih	369,7	377,5	539,5	253,9
28	Cumi-Cumi	-	-	-	51,6
29	Bawal Putih	-	-	205,2	66,3
30	Udang Lain	28,9	32,5	25,8	122,0
Total		10035,3	10074,8	10057,12	6385,8

Sumber : *Biro Pusat Statistik, 2003*

Produksi kepiting Rajungan di kabupaten Pangkep mengalami peningkatan dari tahun 2000 hingga tahun 2002, namun mengalami penurunan produksi pada

tahun 2003. hal ini disebabkan nelayan melakukan penangkapan tanpa melihat keserasian sumberdaya perikanan khususnya kepiting Rajungan. Untuk mempertahankan keserasian tersebut perlu dilakukan pembatasan aturan ukuran penangkapan, pengaturan alat tangkap, kegiatan pengeboman, pembiusan dan penggunaan jaring trawl.

Untuk mendukung produksi penangkapan yang dilakukan oleh nelayan maka perlu didukung oleh ketersediaan jenis dan jumlah alat tangkap. Jenis dan jumlah alat tangkap dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4 : Jenis dan Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Kabupaten Pangkep

No	Jenis Alat Tangkap	Thn 2000	Thn 2001	Thn 2002	Thn 2003
1	Pukat Cincin	142	142	142	143
2	Jaring Insang Hanyut	45	51	43	13
3	Jaring Insang Lingkar	37	30	30	30
4	Jaring Klitik	246	243	222	393
5	Jaring Insang Tetap	304	299	461	286
6	Trammel Net	27	26	26	16
7	Bagan Perahu	87	85	85	82
8	Bagan Tancap	75	66	76	78
9	Pancing	21	21	21	24
10	Serok	4	4	4	7
11	Jala Buang	5	9	11	11
12	Dogol	28	156	167	183
13	Muro Ami	1	1	1	1
14	Aqualung	43	42	41	45
15	Pukat Pantai	2	2	2	2
Total		1067	1177	1332	1314

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2003

Jenis dan jumlah alat tangkap akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas nelayan. Jika alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan jumlahnya besar maka akan sangat mendukung terhadap kegiatan penangkapan sehingga akan dapat

meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Sebaliknya jika alat tangkap tidak mendukung maka akan menyebabkan tangkapan oleh nelayan juga memperoleh hasil yang kurang maksimal.

4.2. Gambaran Umum Responden

Kinerja usaha bidang perikanan dipengaruhi oleh potensi nelayan sebagai pelaku pada sektor perikanan. Karakteristik nelayan mempengaruhi pengembangan usahanya. Karakteristik yang dimaksud yaitu umur nelayan, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha dan jumlah anggota keluarga.

4.2.1 Umur Responden

Berdasarkan teori kependudukan, umur produktif suatu usaha dilakukan yaitu pada 15-55 tahun, karena berdasarkan Undang-undang tenaga kerja yang menetapkan kisaran umur tersebut sebagai usia produktif untuk bekerja, karena pada umur tersebut kemampuan berpikir dan bekerja seseorang relatif produktif. Karakteristik responden berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur di Kabupaten Pangkep.

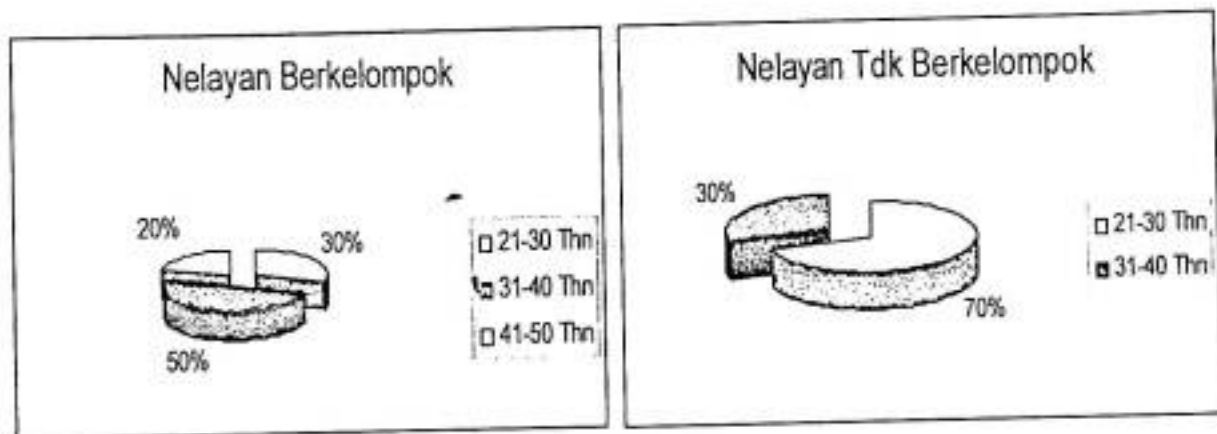
No	Umur (Thn)	Nelayan Berkelompok	Persentase (%)	Nelayan Tdk Berkelompok	Persentase
1	21 - 30	6	30	7	70
2	31 - 40	10	50	3	30
3	41 - 50	4	20	-	-
Total		20	100	10	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 5, tingkat umur 31 - 40 tahun memiliki jumlah yang banyak yaitu pada nelayan yang berkelompok berjumlah 10 orang atau 50 %.

Nelayan yang tidak berkelompok berjumlah 7 orang atau 70 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian umur responden berada pada usia produktif yang dapat mendukung dalam menjalankan usahanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :

Gambar 1 : Diagram Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur



4.2.2. Tingkat Pendidikan

Faktor lain yang mendukung keberhasilan nelayan dalam menjalankan usahanya yaitu pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal yang dimiliki responden. Pendidikan formal dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan berfikir, terutama dalam menyerap keterampilan teknis maupun teknologi baru dalam mencapai tingkat produksi yang lebih baik. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

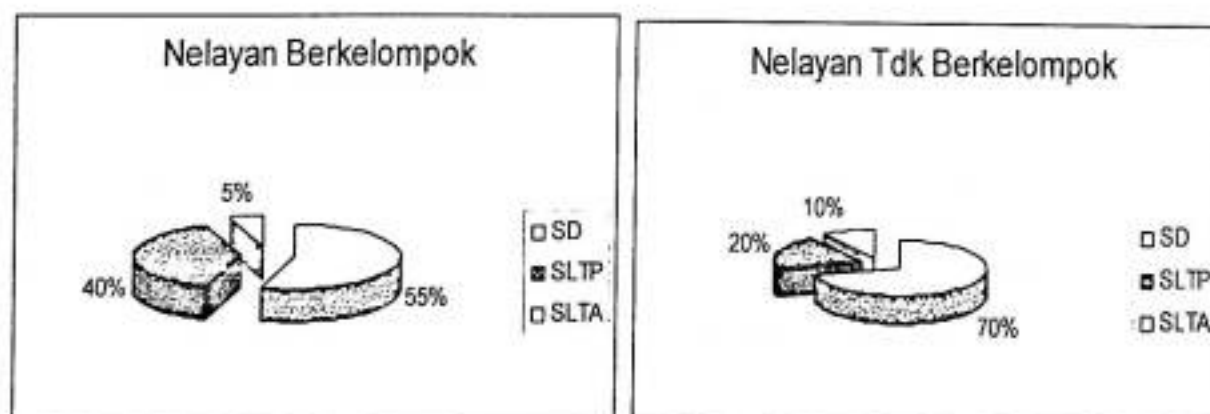
Tabel 6 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangkep.

Tingkat Pendidikan	Nelayan Berkelompok (Orang)	Persentase	Nelayan Tidak Berkelompok (Orang)	Persentase
SD	11	55	7	70
SLTP	8	40	2	20
SLTA	1	5	1	10
Total	20	100	10	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa persentase tingkat pendidikan tertinggi adalah SD yaitu untuk nelayan yang berkelompok berjumlah 11 orang atau 55% dan nelayan tidak berkelompok berjumlah 7 orang atau 70% , sedangkan persentase terendah adalah SLTA yaitu untuk nelayan yang berkelompok berjumlah 1 orang atau 5% dan nelayan yang tidak berkelompok berjumlah 1 orang atau 10%. Hal ini berarti sebagian besar tingkat pendidikan responden berada pada taraf rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas yang dihasilkan oleh nelayan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :

Gambar 2 : Diagram Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



4.2.3. Pengalaman Usaha

Pengalaman usaha ditunjukkan oleh rentang waktu atau lamanya seseorang dalam berusaha. Pengalaman usaha merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas usaha. Sering orang berpendapat bahwa semakin lama rentang waktu pengalaman usaha seseorang, maka semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan dan mengembangkan usaha agar lebih baik. Pengalaman usaha responden yang berkelompok dan tidak berkelompok dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

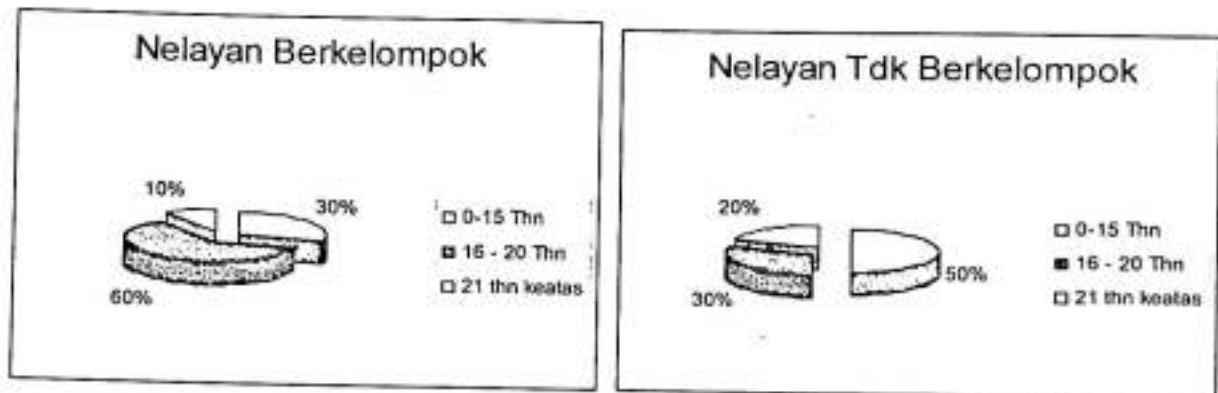
Tabel 7 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usaha di Kabupaten Pangkep.

No	Pengalaman Usaha (Thn)	Nelayan Berkelompok (Orang)	Persentase (%)	Nelayan Tdk Berkelompok (Orang)	Persentase
1	10 - 15	6	30	5	50
2	16 - 20	12	60	3	30
3	21 thn keatas	2	10	2	20
Total		20	100	10	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 7, pengalaman usaha tertinggi responden yaitu 16 - 20 tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 60 % untuk nelayan yang berkelompok. Nelayan yang tidak berkelompok, pengalaman usaha selama 10 - 15 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 50 %. Pengalaman responden cukup lama, hal ini berarti responden sudah mampu mengetahui secara mendalam mengenai seluk beluk usahanya. Dengan demikian pengalaman usaha responden dapat dijadikan salah satu pendukung dalam upaya pengembangan kinerja dan produktivitas usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 berikut :

Gambar 3 : Diagram Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usaha



4.2.4. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan responden yaitu semua orang yang tinggal serumah dengan responde. Anggota keluarga merupakan sumber tenaga kerja, khususnya anggota keluarga yang memiliki umur produktif. Jumlah anggota keluarga responden dapat dilihat pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga Responden di Kabupaten Pangkep

No	Jumlah Anggota Keluarga (Orang)	Nelayan Berkelompok (Orang)	Persentase (%)	Nelayan Tdk Berkelompok (Orang)	Persentase (%)
1	0 - 1	2	10	1	10
2	2 - 3	15	75	5	50
3	4 - 5	2	10	2	20
4	6 - 7	1	5	2	20
Total		20	100	10	100

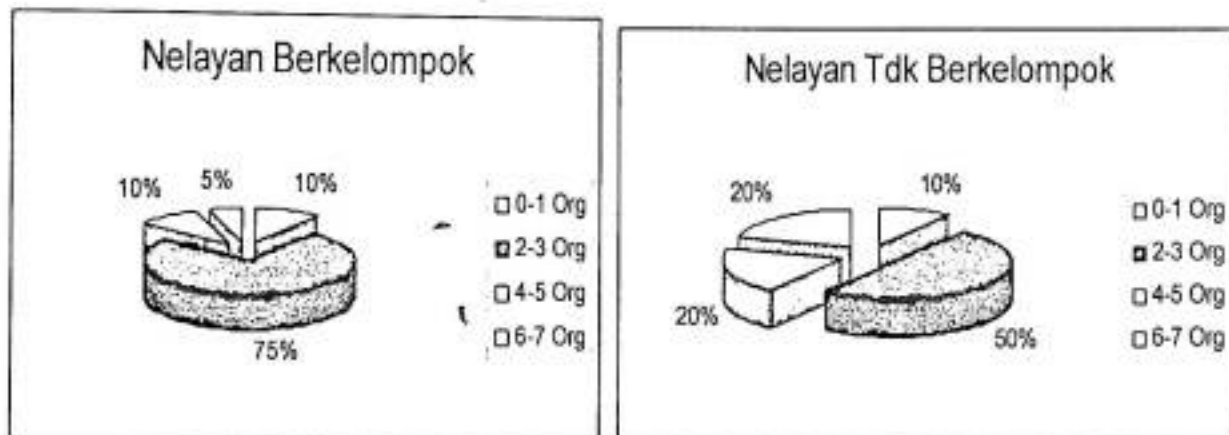
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 8, jumlah responden (nelayan yang berkelompok) yang memiliki anggota keluarga terbesar yaitu 2 - 3 orang yaitu masing-masing 15 orang dengan persentase 75 %. Sedangkan nelayan yang tidak berkelompok, yang memiliki anggota keluarga terbesar yaitu 2 - 3 orang yaitu ada 5 orang dengan persentase 50

% . Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan responden tidak terlalu banyak, sehingga pendapatannya mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5 berikut :

Gambar 4 : Diagram Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Akses Modal

Akses modal nelayan terbagi atas 2 yaitu akses terhadap modal dan akses memperoleh modal. Akses memperoleh modal membahas mengenai kemampuan nelayan memperoleh informasi pemberian modal, kemampuan memenuhi syarat pemberian modal, kemampuan memberikan jaminan dan kemudahan dalam pemberian modal. Akses memperoleh modal membahas mengenai syarat pemberian modal, jumlah kredit yang diberikan, jumlah bunga yang dibebankan dan jangka waktu pengembalian pinjaman.

5.1.1 Akses Terhadap Modal

Modal yang diberikan oleh pihak kreditor adalah modal pinjaman berbentuk uang tunai, karena lebih mudah dalam pengembalian dan sesuai dengan permintaan nelayan. Akses nelayan terhadap modal dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9 : Akses Terhadap Modal

No	Uraian	Nelayan yang Tidak Berkelompok (Orang)		Nelayan yang Berkelompok (Orang)	
		Mudah	Sulit	Mudah	Sulit
1	Kemampuan memperoleh informasi pemberian modal	7	3	8	12
2	Kemampuan memenuhi syarat pemberian modal	8	2	6	14
3	Kemampuan memberikan jaminan	8	2	16	4
4	Kemudahan dalam pemberian modal	10	-	16	4

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005.

Berdasarkan Tabel 9, akses terhadap modal nelayan yang tidak berkelompok lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada jumlah nelayan yang mengatakan mudah lebih banyak dibandingkan dengan nelayan yang mengatakan sulit dalam kemampuan memperoleh informasi pemberian modal, kemampuan memenuhi syarat pemberian modal, kemampuan memberikan jaminan dan kemudahan dalam pemberian modal. Kemudahan yang diperoleh nelayan yang tidak berkelompok disebabkan sifat nelayan yaitu lebih fleksibel (bebas) dalam mendapatkan akses terhadap modal.

Akses terhadap modal oleh nelayan yang berkelompok lebih sulit dalam kemampuan memperoleh informasi pemberian modal, kemampuan memenuhi syarat modal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya nelayan yang mengatakan sulit dibandingkan nelayan yang mengatakan mudah. Kesulitan ini disebabkan adanya sikap bergantung terhadap ketua kelompok. Anggota kelompok menganggap tugas tersebut merupakan tanggung jawab ketua kelompok dan mereka hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan ketua kelompok tersebut. Akan tetapi nelayan yang mengatakan mudah dalam kemampuan memberikan jaminan dan kemudahan dalam pemberian modal lebih banyak dibandingkan dengan nelayan yang mengatakan sulit. Hal ini disebabkan adanya sikap saling tolong menolong antar anggota kelompok dan adanya hubungan kekerabatan yang erat diantara mereka.

5.1.2 Akses Memperoleh Modal

5.1.2.1 Akses Memperoleh Modal untuk Nelayan yang Tidak Berkelompok (Koperasi Baji Ati)

Koperasi Baji Ati merupakan satu-satunya koperasi simpan pinjam yang ada di Kelurahan Pundata Baji. Koperasi ini diprakarsai oleh H. Tahir Dg Ngitung. Koperasi Baji Ati lahir dari inisiatif dan gagasan H. Tahir Dg Ngitung, karena di sekitar tempat tinggal beliau masih terdapat orang-orang yang tidak mempunyai akses modal yang memadai (keterbatasan modal). Kesulitan modal usaha dalam mengembangkan usaha penduduk sekitar yang mendorong H.Tahir Dg Ngitung mendirikan koperasi Baji Ati yang pengelolaannya atas dasar saling percaya dan bersifat terbuka diantara anggotanya. Anggota koperasi Baji Ati pada tahun 2005 berjumlah 56 orang, mereka diantaranya bekerja sebagai nelayan, pedagang, petani dan lain sebagainya yang berada di sekitar Kelurahan Pundata Baji tersebut. Jumlah pinjaman yang diberikan antara Rp 2.500.000 sampai Rp 5.000.000. ✓

Koperasi ini awal pembentukannya dimulai sejak tahun 1999, syarat-syarat menjadi anggota koperasi Baji Ati yaitu :

1. Setiap anggota menyetor Rp 25.000 sebagai simpanan wajib dan Rp 120.000 sebagai simpanan pokok.
2. Bunga yang dibebankan yaitu 1,5 % per bulan

Pengurus koperasi Baji Ati yaitu H.Tahir Dg Ngitung sebagai ketua, Pahrudin sebagai sekertaris dan Nasrum sebagai Bendahara. Pengurus membuat akte pendirian untuk diusulkan pada kantor Departemen Koperasi kabupaten Pangkep

untuk mendapatkan pengesahannya dan pada tanggal 16 Februari 1999. Koperasi Baji Ati disahkan pendiriannya dengan nomor badan hukum : No.06/BH/KDK.20.18/II/1999. Dari penjelasan dan uraian di atas maka koperasi ini adalah koperasi yang tumbuh dan berkembang dari bawah, yaitu dari keinginan H.Tahir Dg Ngitung dengan harapan kehadiran lembaga ekonomi berupa koperasi ini akan membantu meningkatkan usaha mereka melalui simpan pinjam modal usaha.

Anggota koperasi Baji Ati bukan saja berasal dari kelurahan Pundata Baji, tetapi ada juga yang berasal dari luar daerah tersebut, misalnya anggota yang berasal dari pulau Saugi.

5.1.2.2 Akses Memperoleh Modal untuk Nelayan yang Berkelompok (PPK)

Maksud dari Program Pengembangan Kecamatan ini yaitu untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dengan cakupan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. PPK melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada setiap kelompok nelayan berjumlah Rp 25.000.000. Satu kelompok nelayan berjumlah 10 orang, jadi setiap nelayan mendapat Rp 2.500.000. Informasi pemberian bantuan modal tersebut diketahui nelayan dari pegawai PPK yang berkunjung ke tempat nelayan biasa berkumpul (di rumah Pak Burhanuddin) setelah melakukan penangkapan di laut.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah aktifitas masyarakat pedesaan di sektor riil bisa berupa usaha yang memproduksi suatu bahan, bidang penjualan atau pemasaran maupun yang berbentuk jasa. Peruntukan kegiatan UEP yang dapat

diajukan pendanaannya melalui PPK adalah peningkatan atau pengembangan usaha yang menguntungkan dan sedang dijalankan; membuka peluang usaha baru yang menguntungkan sesuai keterampilan/keahlian yang dimiliki dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau membayar kembali.

Syarat-syarat pemberian dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi kelompok nelayan yaitu :

- Memiliki ikatan pemersatu yang jelas
- Saling mengenal diantara anggota-anggotanya
- Mempunyai aktivitas ekonomi atau sosial kemasyarakatan
- Ada pertemuan rutin atau berkala; diantara anggota-anggotanya
- Memiliki pengurus yang dipilih oleh anggota
- Semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama
- Memiliki program kerja yang jelas
- Kepastian jadwal pertemuan rutin
- Memiliki aturan-aturan yang telah disepakati oleh anggota kelompok.
- Memiliki simpanan/tabungan kelompok dengan rasio tertentu (minimal 10 % dari dana yang akan diajukan) terhadap kredit yang diperoleh
- Memiliki administrasi organisasi dan keuangan yang tertib

Bunga yang dibebankan kepada nelayan yaitu sebesar 1 % per bulan atau Rp300.000 per tahun. Jaminan untuk memperoleh pinjaman ini yaitu alat elektronik berupa televisi yang dimiliki oleh nelayan. Jika program ini berhasil, maka program

ini akan berlanjut pada periode berikutnya. Penyetoran pinjaman dilakukan oleh masing-masing ketua kelompok dan menjadi tanggung jawab ketua kelompok.

Nelayan yang berkelompok mendapatkan modal atau kredit dari Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Kelompok yang mendapatkan kredit itu yaitu kelompok nelayan Rezky dan kelompok Ikhlas. Kelompok nelayan ini terbentuk sudah satu tahun yang lalu, tepatnya saat akan diberikannya kredit dari PPK. Cara kelompok nelayan mendapatkan dana UEP yaitu dengan mengajukan surat permohonan kredit dengan melampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing anggota
2. Rencana usaha masing-masing anggota
3. Rencana usaha bersama
4. Pernyataan persediaan tanggung renteng dari seluruh anggota
5. Foto copy surat kuasa kepada bank untuk memindah bukukan tabungan beku kelompok ke rekening UPK di bank sebagai angsuran apabila terjadi tunggakan
6. Foto copy bukti tabungan kelompok di bank dan rencana pengembalian kredit.

Setelah surat permohonan disetujui oleh pihak PPK maka ketua kelompok nelayan menandatangani surat perjanjian kredit.

5.1.2.3 Akses Memperoleh Modal untuk Nelayan yang Berkelompok (PEMP)

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2000.

Masyarakat pesisir yang merupakan sasaran dalam program PEMP dibentuk dalam kelompok yang disebut Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). KMP ini diharapkan dapat mencapai kemandirian ekonomi masyarakat desa/kelurahan pesisir guna meningkatkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat pesisir.

Dana Ekonomi Produktif (DEP) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah dana untuk pengembangan usaha KMP yang menjadi kelompok sasaran. Penyaluran Dana Ekonomi produktif (DEP) Program PEMP kabupaten Pangkep tahun Anggaran 2004 dilakukan oleh LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir–Mikro,Mitra,Mina) yang diterima sebesar Rp462.134.000,- (Empat ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang telah disalurkan kepada 18 Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) yang tersebar di 3 (Tiga) kecamatan dalam wilayah Pangkep.

Dalam penyaluran DEP Program PEMP kabupaten Pangkep T.A 2004 lewat lembaga ekonomi yang dibentuk yakni LEPP-M3 dibantu oleh konsultan manajemen dengan membuat perjanjian pemberian dana antara pemimpin bagian proyek (Pimbagro) dengan LEPP-M3 dalam hal ini ketua LEPP-M3 dalam menarik dana

KPKN untuk disalurkan kepada masyarakat pemanfaat (KMP) dilakukan melalui rekening LEPP-M3 untuk selanjutnya disalurkan kepada kelompok masyarakat pemanfaat yang dinyatakan sebagai penerima DEP Program PEMP tersebut.

Sasaran program PEMP T.A 2004 dipilih berdasarkan kriteria diantaranya merupakan masyarakat pesisir yang terkena dampak kenaikan BBM relatif banyak dan merupakan daerah yang memiliki sumberdaya perikanan dan kelautan relatif besar. Program PEMP telah memberikan kesempatan berusaha yang lebih besar dengan upaya optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan kesempatan yang lebih luas, penciptaan lapangan kerja dan ekonomi masyarakat pesisir, serta mendorong terwujudnya manajemen pembangunan partisipasi dan transparan.

Mengacu pada sasaran program tersebut, maka penyaluran dana PEMP di kecamatan Pangkajene diprioritaskan pula pada masyarakat miskin yang hidup di daerah pesisir yang memiliki pekerjaan yang terkait dengan perikanan dan kelautan yang terbentuk dalam satu kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) yang memiliki satu unit usaha. Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk menilai apakah anggota KMP tersebut miskin adalah tingkat pendapatan masing-masing KMP. Pendapatan rata-rata anggota KMP berkisar antara p 17.220,00 – 32.068,00 per hari, tingkat pendapatan ini tentunya masih rendah dibandingkan dengan kebutuhannya yang harus dipenuhi setiap hari. Selain itu anggota KMP menerima dana PEMP umumnya bemata pencaharian yang berhubungan dengan sektor perikanan dan kelautan.

KMP binaan LEPP adalah KMP terpilih yang didasarkan pada hasil keputusan tim verifikasi yang terdiri dari konsultan manajemen, Tenaga Pendamping Desa (TPD) bersama mitra desa serta pengurus LEPP yang kemudian hasil verifikasi disahkan oleh kepala Dinas perikanan dan kelautan kabupaten Pangkep dan Pedoman Umum PEMP. Dengan adanya verifikasi langsung ke lapangan diharapkan TPD bersama LEPP dapat melihat langsung kondisi KMP yang akan dibentuk.

Dana Ekonomi Produktif (DEP) merupakan dana penguatan modal usaha dan bantuan investasi untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada lembaga yang terdiri dari Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) yang mampu dan terpilih.

Adapun penentuan KMP didasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Adanya kesamaan usaha diantara para anggota KMP
2. Hasil verifikasi menunjukkan anggota KMP tersebut layak untuk menerima dana PEMP tersebut.

Agar dalam penyaluran dan pengembalian Dana Ekonomi Produktif lewat LEPP-M3 dapat berjalan dengan baik dan berlangsung efektif dan efisien, sebagaimana pada prinsip dan pendekatan program yakni tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Maka sebelum penentuan kelompok-kelompok penerima Dana Ekonomi Produktif (DEP) maka hal-hal yang dilakukan LEPP-M3 yaitu :

1. Melakukan verifikasi ke lapangan yang dibentuk dalam sebuah tim verifikasi yang komponen di dalamnya terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan

kabupaten Pangkep, konsultan manajemen program PEMP kabupaten T.A 2004, LEPP-M3 dan Pemimpin Bagian Proyek (Pimbagro).

2. Setiap kelompok- kelompok tersebut harus membuat proposal permohonan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Menyiapkan dan menyerahkan agunan/jaminan dan semacamnya sebagai jaminan Peminjaman serta penyerahan dan penyertaan sebesar 25%. Dana penyertaan yang disediakan oleh KMP untuk dibayarkan selama 24 bulan ke LEPP-M3 merupakan suatu jaminan atau tabungan yang nantinya akan dikembalikan tiap bulan (Cicilan) ke KMP.
4. LEPP-M3 menyiapkan semua kelengkapan administrasi, dokumentasi pembayaran berupa kuitansi, berita penyerahan DEP antara kelompok penerima dengan LEPP-M3. Hal ini dilakukan agar tujuan dari program PEMP kabupaten Pangkep T.A 2004 tercapai dengan efektif dan efisien sebagai tujuan dan sasaran program yakni dana bantuan modal usaha untuk masyarakat pesisir yang kurang mampu dengan pola penyaluran dapat terwujud.

5.2. Pemanfaatan Kredit Nelayan

5.2.1. Pemanfaatan Kredit Nelayan yang Tidak Berkelompok (Koperasi)

Kredit yang diberikan koperasi Baji Ati kepada nelayan yang tidak berkelompok dimanfaatkan untuk tambahan pembelian jaring atau keperluan yang mendesak. Pihak koperasi Baji Ati tidak berhak untuk mengontrol pemanfaatan kredit yang diberikan kepada nelayan.

5.2.2. Pemanfaatan Kredit Nelayan yang Berkelompok (PPK)

Kredit yang diterima oleh kelompok nelayan Rezky dan Ikhlas berjumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap kelompok. Jadi setiap anggota memperoleh Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Uang tersebut dimanfaatkan oleh semua nelayan untuk membeli jaring. Kredit yang diterima diserahkan kepada ketua kelompok, dan dibagikan kepada anggotanya. Kredit yang diberikan dimanfaatkan secara perorangan.

Setiap ketua kelompok diberi tanggung jawab untuk mengontrol pemanfaatan kredit yang diberikan. Ketua kelompok melaporkan ke PPK apabila terdapat penyalahgunaan kredit yang diberikan. Jadi kelebihan suatu kelompok nelayan yaitu sebagai pemantau pemanfaatan kredit yang diberikan.

5.2.3. Pemanfaatan Kredit Nelayan yang Berkelompok (PEMP)

Untuk mengefektifkan program DEP serta mengantisipasi kemandekan dana, maka LEPP-M3 melakukan upaya-upaya pemantauan secara langsung melalui TPD yang mendampingi kelompok yang berjumlah 1 orang untuk setiap kecamatan. Bentuk pendampingan yang dilakukan berupa sosialisasi dan desminasi, melakukan pelatihan penangkapan, pengolahan dan pembinaan yang terus berkelanjutan. Melakukan kunjungan dan mengevaluasi langsung setiap kelompok penerima agar tidak terjadi kebekuan dana pada kelompok-kelompok penerima. Sehingga masyarakat lain juga dapat kesempatan berusaha yang lebih baik. Selain itu, LEPP-M3 melakukan pembinaan-pembinaan dengan memberikan motivasi atau dorongan

semangat kepada kelompok-kelompok penerima DEP untuk selalu berupaya memenuhi kewajibannya.

Dengan harapan dan pengembalian dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan yang sesuai dengan sasaran program yakni optimalisasi potensi sumberdaya pesisir dan laut yang dimiliki, maka kelompok-kelompok masyarakat pemanfaat yang belum tersentuh juga dapat menerima Dana Ekonomi Produktif dalam upaya peningkatan taraf hidup mereka

Pada kelurahan Tekolabbua, kecamatan Pangkajene jumlah dana yang disalurkan pada tanggal 1 bulan Januari 2005 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang disalurkan pada 5 kelompok (75 anggota). Masing-masing anggota mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Nelayan yang berkelompok lebih baik dalam memanfaatkan pinjaman modal daripada nelayan yang tidak berkelompok. Hal ini disebabkan karena adanya rasa tanggung jawab seorang ketua kelompok dalam mengontrol pemanfaatan pinjaman modal yang diberikan oleh pihak kreditor.

5.3. Kelancaran Pengembalian Kredit

5.3.1. Kelancaran Pengembalian Kredit Nelayan yang Tidak Berkelompok (Koperasi).

Nelayan yang tidak berkelompok mengembalikan kredit setiap bulan kepada koperasi Baji Ati beserta bunganya. Apabila terjadi tunggakan pembayaran, pihak koperasi tidak memberikan denda kepada nelayan, hanya pihak koperasi tidak memberikan pinjaman lagi sebelum nelayan melunasi pinjamannya. Nelayan yang

meminjam pada koperasi sering menunggak dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini disebabkan karena hasil tangkapan nelayan yang tidak menentu dan banyaknya keperluan lain yang harus dibiayai. Kekurangan meminjam kredit di Koperasi secara perorangan yaitu nelayan menanggung sendiri pinjaman yang diberikan.

5.3.2 Kelancaran Pengembalian Kredit Nelayan yang Berkelompok (PPK).

Kelompok nelayan yang memperoleh pinjaman modal dari UEP yaitu kelompok nelayan Rezky dan Ikhlas mengembalikan kredit setiap bulan (sesuai tanggal pada surat perjanjian kredit) ke penyelenggara pemberian bantuan kredit PPK beserta bunganya. Selama program ini berjalan, belum pernah kelompok nelayan menunggak membayar pinjaman tersebut. Hal ini disebabkan peran masing-masing ketua kelompok yang baik. Keuntungan terbentuknya kelompok nelayan ini yaitu apabila seorang nelayan dalam satu bulan tidak dapat membayar pinjamannya maka ketua kelompok atau anggota kelompok lain yang menutupi kekurangan tersebut. Kelompok nelayan ini berperan penting, yaitu saling membantu apabila terjadi kekurangan uang dan adanya ketua kelompok yang berperan sebagai pemberi jaminan kepada kreditor.

5.3.3. Kelancaran Pengembalian Kredit Nelayan yang Berkelompok (PEMP).

Proses pemberian dana kepada KMP dilakukan sekaligus dengan pengembalian dana diangsur tiap bulan sebesar Rp 365.000 per kelompok dengan angsuran bunga 15 % selama pengembalian 24 bulan.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak LEPP adalah sebagian masyarakat memiliki persepsi tentang dana pemberdayaan adalah bantuan, sehingga

KMP binaan terpengaruh dengan informasi tersebut dan menyebabkan sebagian kelompok nelayan tidak lancar melakukan pembayaran kredit.

Nelayan yang berkelompok lebih baik dalam mengembalikan dana pinjaman daripada nelayan yang tidak berkelompok. Hal ini disebabkan karena adanya rasa tanggung jawab seorang ketua kelompok dalam mengembalikan dana pinjaman, dan adanya sikap tolong menolong antar anggota kelompok karena adanya kedekatan antar anggota kelompok.

5.4 Peningkatan Pendapatan Nelayan

Nelayan yang berkelompok dan yang tidak berkelompok mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan modal pinjaman modal dari kreditor. Untuk mengetahui jumlah peningkatan pendapatan nelayan dapat dilihat pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10 : Peningkatan Pendapatan Nelayan Sebelum dan Setelah Mendapatkan Modal

No	Uraian	Rata-Rata Pendapatan (Rp)		Peningkatan Pendapatan (Rp)
		Sebelum	Setelah	
1	Nelayan yang Tidak Berkelompok (koperasi)	373.240	686.680	313.440
2	Nelayan yang Berkelompok (PPK)	514.070	824.876	310.806
3	Nelayan yang Berkelompok (PEMP)	601.602	865.200	263.958

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 10, nelayan yang mengalami peningkatan pendapatan terbesar yaitu nelayan yang tidak berkelompok yang mendapatkan modal pinjaman dari koperasi Baji Ati sebesar Rp 313.440. Kemudian nelayan yang berkelompok

yang mendapatkan modal pinjaman dari PPK sebesar Rp 310.806 dan yang terendah yaitu nelayan yang berkelompok yang mendapatkan modal pinjaman dari PEMP sebesar Rp 263.958.

5.4.1 Peningkatan Pendapatan Nelayan yang Tidak Berkelompok (Koperasi)

Pendapatan rata-rata nelayan yang tidak berkelompok sebelum mengakses modal dari koperasi Baji Ati yaitu Rp 373.240 per bulan atau 20 trip. Setelah mengakses modal dari koperasi Baji Ati pendapatannya menjadi Rp 686.680 per bulan. Tingkat pendapatan nelayan sebelum mendapatkan modal dari koperasi Baji Ati dapat dilihat pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11 : Tingkat Pendapatan Nelayan yang Tidak Berkelompok Sebelum Mendapat Kredit dari Koperasi

Tingkat Pendapatan (Rp)	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase
200.000-299.999	1	10
300.000-399.999	6	60
400.000-499.999	3	30
Total	10	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 11, sebagian besar pendapatan nelayan sebelum menerima kredit dari koperasi Baji Ati berkisar antara Rp 300.000 sampai Rp 399.000 yaitu sebanyak 6 orang atau sekitar 60 %, Rp 300.000 sampai Rp 399.000 sebanyak 3 orang atau sekitar 30 %, Rp 400.000 sampai Rp 499.000 sebanyak 1 orang atau hanya 10 %.

Setelah menerima kredit dari koperasi, pendapatan nelayan dapat dilihat pada Tabel 12 berikut :

Tabel 12 : Tingkat Pendapatan Nelayan yang Tidak Berkelompok Setelah Mendapat Kredit dari Koperasi

Tingkat Pendapatan (Rp)	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase
< 500.000	-	0
500.000-800.000	8	80
> 800.000	2	20
Total	10	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 12, sebagian besar pendapatan nelayan berkisar antara Rp500.000 sampai Rp 800.000 yaitu sebanyak 8 orang atau sekitar 80 %. Dan hanya 2 orang yang berpendapatan diatas Rp 800.000 atau sekitar 20 %.

Berdasarkan hasil analisis pendapatan dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapatan responden sebelum dan setelah menerima kredit dari Koperasi. Namun untuk lebih jelas perbedaan pendapatan responden, maka dipakai uji sebaran t.

Berdasarkan hasil analisis pendapatan dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapatan responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal dari koperasi. Namun untuk lebih jelas perbedaan pendapatan responden, maka dipakai uji sebaran t. Dari uji sebaran t pada lampiran, maka diperoleh hasil t-hitung 6,37; t-tabel 2,228. Hal ini berarti bahwa t-hitung > t-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata pendapatan responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal dari koperasi Baji Ati, pada taraf kepercayaan 95%.

5.4.2 Peningkatan Pendapatan Nelayan yang Berkelompok (PPK)

Pendapatan rata-rata nelayan yang berkelompok sebelum mengakses modal dari UEP sebesar Rp 514.070 per bulan atau 20 trip. Peningkatan pendapatan nelayan

yang berkelompok yang mendapatkan modal dari PPK dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 13 : Tingkat Pendapatan Nelayan yang Berkelompok Sebelum Mendapat Kredit dari PPK

Tingkat Pendapatan (Rp)	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase
200.000-399.999	-	0
400.000-499.999	3	30
500.000-599.999	7	70
Total	10	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 13, sebagian besar pendapatan nelayan sebelum menerima modal pinjaman (kredit) dari PPK melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berkisar antara Rp 500.000 sampai Rp 599.999 yaitu sebanyak 7 orang atau sekitar 70 % dan pendapatan sekitar Rp 400.000 sampai Rp 499.999 sebanyak 3 orang atau sekitar 30 %. Setelah menerima kredit pendapatannya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut :

Tabel 14 : Tingkat Pendapatan Nelayan yang Berkelompok Setelah Mendapat Kredit dari PPK

Tingkat Pendapatan (Rp)	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase
< 600.000	-	0
600.000-800.000	3	30
> 800.000	7	70
Total	10	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 14, pendapatan nelayan yang menerima bantuan modal dari PPK melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang berkisar antar Rp 600.000 sampai Rp 800.000 sebanyak 3 orang atau sekitar 30 %, untuk penghasilan diatas Rp 800.000 sebanyak 7 orang atau sekitar 70 %. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal yang diberikan PPK mampu meningkatkan pendapatan nelayan.

Berdasarkan hasil analisis pendapatan dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapatan responden sebelum dan setelah menerima kredit dari PPK. Namun untuk lebih jelas perbedaan pendapatan responden, maka dipakai uji sebaran t.

Berdasarkan hasil analisis pendapatan dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapatan responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal dari PPK melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Namun untuk lebih jelas perbedaan pendapatan responden, maka dipakai uji sebaran t. Dari uji sebaran t pada lampiran, maka diperoleh hasil t-hitung 66,005 t-tabel 2,228. Hal ini berarti bahwa t-hitung > t-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata pendapatan responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal dari koperasi Baji Ati, pada taraf kepercayaan 95%.

5.4.2 Peningkatan Pendapatan Nelayan yang Berkelompok (PEMP)

Pendapatan rata-rata anggota KMP sebelum mendapatkan modal adalah Rp601.602 per bulan (20 trip). Pendapatan ini tentunya masih rendah jika dihadapkan pada kompleksitas kebutuhan yang dimiliki, baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan di dalam melakukan usahanya. Peningkatan pendapatan responden dapat dilihat pada Tabel 15 berikut :

Tabel 15 : Tingkat Pendapatan Nelayan yang Berkelompok Sebelum Mendapat Kredit dari PEMP

Tingkat Pendapatan (Rp)	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase
100.000-399.999	1	10
400.000-699.999	7	70
700.000-999.999	2	20
Total	10	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 15, pendapatan nelayan sebelum menerima dana PEMP sebagian besar berkisar antara Rp 400.000 sampai Rp 699.000 yaitu sebanyak 7 orang atau sekitar 70 %, Rp 700.000 sampai Rp 999.999 sebanyak 2 orang atau sekitar 20 %, dan Rp 100.000 sampai Rp 399.999 sebanyak 1 orang atau sekitar 10 %. Pendapatan setelah menerima dana PEMP dapat dilihat pada Tabel 16 berikut :

Tabel 16 : Tingkat Pendapatan Nelayan yang Berkelompok Setelah Mendapat Dana PEMP

Tingkat Pendapatan (Rp)	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase
< 500.000	1	10
500.000-1.000.000	7	70
> 1.000.000	2	20
Total	10	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005

Berdasarkan Tabel 16, nelayan yang berpenghasilan kurang dari Rp 500.000 sebanyak 1 orang atau sekitar 10 %, Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 sebanyak 7 orang atau sekitar 70 % dan diatas Rp 1.000.000 sebanyak 2 orang atau sekitar 20 %.

Berdasarkan hasil analisis pendapatan dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapatan responden sebelum dan setelah menerima dana PEMP. Namun untuk lebih jelas perbedaan pendapatan responden, maka dipakai uji sebaran t.

Dari uji sebaran t pada lampiran, maka diperoleh hasil t-hitung ; t-tabel 2,228 hal ini berarti bahwa t-hitung > t-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata pendapatan responden sebelum dan setelah menerima dana PEMP, pada taraf kepercayaan 95%.

Nelayan yang berkelompok maupun yang tidak berkelompok mengalami peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini disebabkan karena adanya peningkatan kemampuan operasional nelayan yaitu dengan bertambahnya jaring yang dimiliki. Hal ini berarti nelayan memanfaatkan pinjaman yang diberikan dengan baik dan nelayan berharap bantuan ini diberikan kepada nelayan yang lain yang juga membutuhkan pinjaman modal untuk meningkatkan pendapatan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Nelayan yang tidak berkelompok mendapatkan akses untuk memperoleh modal dengan menjadi anggota koperasi Baji Ati. Nelayan yang berkelompok mendapatkan akses untuk memperoleh modal dengan mengikuti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
2. Nelayan yang berkelompok lebih baik dan terarah dalam pemanfaatan modal pinjaman daripada nelayan yang tidak berkelompok.
3. Nelayan yang berkelompok lebih lancar (tidak menunggak) dalam pengembalian modal pinjaman daripada nelayan yang tidak berkelompok.
4. Ada peningkatan pendapatan baik nelayan yang berkelompok maupun yang tidak berkelompok setelah mendapatkan modal pinjaman.

6.2. Saran

Demi tercapainya kesejahteraan nelayan, sebaiknya jumlah modal pinjaman yang diberikan lebih besar jumlahnya dan intensitas pembinaan kepada nelayan mengenai pengolahan hasil-hasil perikanan agar nelayan mendapatkan penghasilan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1992. *Keputusan Menteri Pertanian No.41/Kpts/OT210/1/1992 Tentang Penilaian Kemampuan Kelompok Tani*. DIKLAT APP Gowa.
- Anonim. 1998. *Manual Teknis Program Pengembangan Kecamatan*. Tim Koordinasi PPK Tingkat Pusat. Jakarta
- Arbi S. 2003. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Djambatan. Jakarta.
- Baswir R. 2000. *Koperasi Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2 Juli 2005. *Perikanan Tangkap Indonesia*. <http://www.dkp.go.id/content.php?c=129.htm>
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2003. *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Depertemen kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Makassar.
- Arief A. 2002. *Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Maros*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Dahuri R, dkk. 2000. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*. LISPI. Jakarta.
- Dianthani D, dkk. 2 Juli 2005. *Pemberdayaan Industri Perikanan Nasional Melalui Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai*. http://www.rudyct.tripod.com/sem2_023/kel2_sem2_023.htm.
- Duwila N N. 2003. *Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Nelayan Tradisional di Maluku Utara*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hammando. 2002. *Dinamika Kelompok dalam Pengembangan Intensifikasi Kulis Jagung Kuning pada Lahan Kritis*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Made S, Sri S A dan Ilmawaty I. 2004. *Peranan Lembaga Ekonomi Non Formal Pada Masyarakat Nelayan di Kota Makassar*. Ponggawa Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Masri. 2001. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Kelompok di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru*. Skripsi Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Singarimbun M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usaha Tani*. University Indonesia Press. Jakarta.
- Soekartawi. 2001. *Agribisnis Teori dan Aplikasi*. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudjana dalam Suwandi B. 2002. *Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Gowa*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sukirno S. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Penerbit PT Raja Grafindo. Jakarta.

Lampiran 1 : Jenis dan Nilai Penyusutan Alat Nelayan Sebelum Mendapatkan Kredit

A. Nelayan yang Berkelompok

No	Kapal			Mesin			Jaring						
	Nilai baru (Rp)	Lama pakai (thn)	Nilai sisa (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai baru (Rp)	Lama pakai (thn)	Nilai sisa (Rp)	Penyusutan (Rp)	Jumlah (Buah)	Nilai baru (Rp)	Lama pakai (thn)	Nilai sisa (Rp)	Penyusutan (Rp)
1	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	3	900.000	3	450.000	150.000
2	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	3	900.000	3	450.000	150.000
3	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	3	900.000	3	450.000	150.000
4	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	4	1.200.000	3	600.000	200.000
5	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.500.000	5	1.000.000	500.000	3	900.000	4	500.000	100.000
6	8.000.000	7	7.000.000	428.571	3.000.000	5	1.000.000	400.000	3	900.000	3	450.000	150.000
7	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	6	1.000.000	333.333	4	1.200.000	3	600.000	200.000
8	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	6	1.000.000	333.333	4	1.200.000	3	600.000	200.000
9	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.500.000	5	1.000.000	500.000	3	900.000	3	450.000	150.000
10	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.500.000	5	1.000.000	500.000	3	900.000	3	450.000	150.000
11	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	5	1.000.000	400.000	4	1.200.000	3	600.000	200.000
12	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	4	1.200.000	3	600.000	200.000
13	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	6	1.000.000	333.333	3	900.000	3	450.000	150.000
14	9.000.000	7	7.000.000	285.714	4.500.000	7	1.500.000	428.571	4	1.200.000	4	600.000	150.000
15	9.000.000	7	7.000.000	285.714	4.500.000	7	1.500.000	428.571	4	1.200.000	4	600.000	150.000
16	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.500.000	5	1.000.000	500.000	3	900.000	3	450.000	150.000
17	8.000.000	7	5.000.000	428.571	3.500.000	5	1.000.000	500.000	3	900.000	3	450.000	150.000
18	8.000.000	7	5.000.000	428.571	3.000.000	5	1.000.000	400.000	3	900.000	4	450.000	112.500
19	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.000.000	5	1.000.000	400.000	3	900.000	3	450.000	150.000
20	8.000.000	7	5.000.000	427.571	3.500.000	5	1.000.000	500.000	4	1.200.000	4	600.000	150.000

Lampiran 2 : Rekapitulasi Analisis Biaya Produksi Sebelum Mendapatkan Kredit
A. Nelayan yang Berkelompok

No	Biaya Tetap				Biaya Variabel				
	Penyusutan (Rp)	Biaya Pemeliharaan (Rp)	Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Total (Rp)	Solar (Rp)	Oli (Rp)	Konsumsi (Rp)	Total (Rp)
1	1.904	3.066	138	833	5941	9.200	5.500	3.000	17.700
2	1.904	3.066	138	833	5.941	9.200	5.500	3.000	17.700
3	1.904	3.066	138	833	5.941	9.200	5.500	3.000	17.700
4	2.043	3.066	138	833	6.080	9.200	5.500	3.000	17.700
5	2.708	3.066	138	833	7.015	9.200	5.500	3.000	17.700
6	2.718	3.066	138	833	6.755	9.200	5.500	3.000	17.700
7	2.175	3.066	138	833	6.212	9.200	5.500	3.000	17.700
8	2.175	3.066	138	833	6.212	9.200	5.500	3.000	17.700
9	2.847	3.066	138	833	6.884	11.500	5.500	3.000	20.000
10	2.847	3.066	138	833	6.884	11.500	5.500	3.000	20.000
11	2.361	3.066	138	833	6.398	11.500	5.500	3.000	20.000
12	2.043	3.066	138	833	6.080	11.500	5.500	3.000	20.000
13	2.037	3.066	138	833	6.074	11.500	5.500	3.000	20.000
14	2.400	3.066	138	833	6.437	6.900	5.500	3.000	15.400
15	2.400	3.066	138	833	6.437	6.900	5.500	3.000	15.400
16	2.847	3.066	138	833	6.884	6.900	5.500	3.000	15.400
17	2.996	3.066	138	833	7.033	6.900	5.500	3.000	15.400
18	2.614	3.066	138	833	6.651	6.900	5.500	3.000	15.400
19	2.569	3.066	138	833	6.606	9.200	5.500	3.000	17.700
20	2.996	3.066	138	833	7.033	9.200	5.500	3.000	17.700

B. Nelayan yang Tidak Berkelompok

No	Biaya Tetap					Biaya Variabel				
	Penyusutan (Rp)	Biaya Pemeliharaan (Rp)	Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Total (Rp)	Solar (Rp)	Oli (Rp)	Konsumsi (Rp)	Total (Rp)
1	1.904	3.066	138	1.250	4.000	11.608	9.200	5.500	3.000	17.700
2	1.904	3.066	138	1.250	4.000	11.608	9.200	5.500	3.000	17.700
3	2.268	3.066	138	1.250	4.000	11.972	6.900	5.500	3.000	15.400
4	2.400	3.066	138	1.250	4.000	12.104	6.900	5.500	3.000	15.400
5	2.400	3.066	138	1.250	4.000	12.104	6.900	5.500	3.000	15.400
6	2.764	3.066	138	1.250	4.000	12.468	6.900	5.500	3.000	15.400
7	2.764	3.066	138	1.250	4.000	12.468	6.900	5.500	3.000	15.400
8	2.764	3.066	138	1.250	4.000	12.468	9.200	5.500	3.000	17.700
9	2.268	3.066	138	1.250	4.000	11.972	9.200	5.500	3.000	17.700
10	1.904	3.066	138	1.250	4.000	11.608	9.200	5.500	3.000	17.700

Lampiran 3: Jenis dan Nilai Penyusutan Alat Nelayan Sesudah Mendapatkan Kredit

A. Nelayan yang Berkelompok

No	Kapal				Mesin				Jaring				
	Nilai baru (Rp)	Lama pakai (thn)	Nilai sisa (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai baru (Rp)	Lama pakai (thn)	Nilai sisa (Rp)	Penyusutan (Rp)	Jumlah (Buah)	Nilai baru (Rp)	Lama pakai (thn)	Nilai sisa (Rp)	Penyusutan (Rp)
1	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	4	1.200.000	3	450.000	250.000
2	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	4	1.200.000	3	450.000	250.000
3	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	4	1.200.000	3	450.000	250.000
4	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	5	1.500.000	3	600.000	300.000
5	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.500.000	5	1.000.000	500.000	4	1.200.000	4	500.000	175.000
6	8.000.000	7	7.000.000	428.571	3.000.000	5	1.000.000	400.000	4	1.200.000	3	450.000	250.000
7	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	6	1.000.000	333.333	5	1.500.000	3	600.000	300.000
8	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	6	1.000.000	333.333	5	1.500.000	3	600.000	300.000
9	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.500.000	5	1.000.000	500.000	4	1.200.000	3	450.000	250.000
10	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.500.000	5	1.000.000	500.000	4	1.200.000	3	450.000	250.000
11	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	5	1.000.000	400.000	5	1.500.000	3	600.000	300.000
12	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	5	1.500.000	3	600.000	300.000
13	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	6	1.000.000	333.333	4	1.200.000	3	450.000	250.000
14	9.000.000	7	7.000.000	285.714	4.500.000	7	1.500.000	428.571	5	1.500.000	4	600.000	225.000
15	9.000.000	7	7.000.000	285.714	4.500.000	7	1.500.000	428.571	5	1.500.000	4	600.000	225.000
16	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.500.000	5	1.000.000	500.000	4	1.200.000	3	450.000	250.000
17	8.000.000	7	5.000.000	428.571	3.500.000	5	1.000.000	500.000	4	1.200.000	3	450.000	250.000
18	8.000.000	7	5.000.000	428.571	3.000.000	5	1.000.000	400.000	4	1.200.000	4	450.000	187.500
19	8.000.000	8	5.000.000	375.000	3.000.000	5	1.000.000	400.000	4	1.200.000	3	450.000	250.000
20	8.000.000	7	5.000.000	427.571	3.500.000	5	1.000.000	500.000	5	1.500.000	4	600.000	225.000

B. Nelayan yang Tidak Berkelompok

No	Kapal			Mesin			Jaring			Penyusutan (Rp)		
	Nilai baru (Rp)	Lama pakai (thn)	Nilai sisa (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai baru (Rp)	Lama pakai (thn)	Nilai sisa (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai baru (Rp)		Lama pakai (thn)	Nilai sisa (Rp)
1	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	1.200.000	3	450.000	250.000
2	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	1.200.000	3	450.000	250.000
3	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.500.000	6	1.000.000	416.666	1.200.000	3	450.000	250.000
4	8.000.000	7	5.000.000	428.571	3.000.000	7	1.000.000	285.714	1.200.000	3	450.000	250.000
5	8.000.000	7	5.000.000	428.571	3.000.000	7	1.000.000	285.714	1.200.000	2	450.000	250.000
6	8.000.000	7	5.000.000	428.571	3.500.000	6	1.000.000	416.666	1.200.000	3	450.000	250.000
7	8.000.000	7	5.000.000	428.571	3.500.000	6	1.000.000	416.666	1.200.000	3	450.000	250.000
8	8.000.000	7	5.000.000	428.571	3.500.000	6	1.000.000	416.666	1.200.000	3	450.000	250.000
9	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.500.000	6	1.000.000	416.666	1.200.000	3	450.000	250.000
10	9.000.000	8	7.000.000	250.000	3.000.000	7	1.000.000	285.714	1.200.000	3	450.000	250.000

Lampiran 4 : Rekapitulasi Analisis Biaya Produksi Sesudah Mendapatkan Kredit
 A. Nelayan yang Berkelompok

No	Biaya Tetap				Biaya Variabel			Total (Rp)
	Penyusutan (Rp)	Biaya Pemeliharaan (Rp)	Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Solar (Rp)	Oli (Rp)	Konsumsi (Rp)	
1	2.182	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700
2	2.182	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700
3	2.182	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700
4	2.321	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700
5	2.916	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700
6	2.996	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700
7	2.453	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700
8	2.453	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700
9	3.125	3.066	138	833	11.500	5.500	3.000	20.000
10	3.125	3.066	138	833	11.500	5.500	3.000	20.000
11	2.638	3.066	138	833	11.500	5.500	3.000	20.000
12	2.460	3.066	138	833	11.500	5.500	3.000	20.000
13	2.314	3.066	138	833	11.500	5.500	3.000	20.000
14	2.609	3.066	138	833	6.900	5.500	3.000	15.400
15	2.609	3.066	138	833	6.900	5.500	3.000	15.400
16	3.125	3.066	138	833	6.900	5.500	3.000	15.400
17	3.273	3.066	138	833	6.900	5.500	3.000	15.400
18	2.822	3.066	138	833	6.900	5.500	3.000	15.400
19	2.847	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700
20	3.196	3.066	138	833	9.200	5.500	3.000	17.700

B. Nelayan yang Tidak Berkelompok

No	Biaya Tetap				Biaya Variabel					
	Penyusutan (Rp)	Biaya Pemeliharaan (Rp)	Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Total (Rp)	Solar (Rp)	Oli (Rp)	Konsumsi (Rp)	Total (Rp)
1	2.182	3.066	138	1.250	4.000	10.636	9.200	5.500	3.000	17.700
2	2.182	3.066	138	1.250	4.000	10.636	9.200	5.500	3.000	17.700
3	2.546	3.066	138	1.250	4.000	11.000	6.900	5.500	3.000	15.400
4	2.678	3.066	138	1.250	4.000	11.132	6.900	5.500	3.000	15.400
5	2.678	3.066	138	1.250	4.000	11.132	6.900	5.500	3.000	15.400
6	3.042	3.066	138	1.250	4.000	11.496	6.900	5.500	3.000	15.400
7	3.042	3.066	138	1.250	4.000	11.496	6.900	5.500	3.000	17.700
8	3.042	3.066	138	1.250	4.000	11.496	9.200	5.500	3.000	17.700
9	2.546	3.066	138	1.250	4.000	11.000	9.200	5.500	3.000	17.700
10	2.182	3.066	138	1.250	4.000	10.636	9.200	5.500	3.000	17.700

Lampiran 5 : Rekapitulasi Tingkat Pendapatan Nelayan

A. Nelayan yang Berkelompok

NO	SEBELUM				SETELAH			
	Produksi (Kg)	Penerimaan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pendapatan (Rp)	Produksi (Kg)	Penerimaan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	3.5	52.500	23.040	29.460	6	90.000	30.840	59.160
2	3	45.000	22.635	22.365	5	75.000	30.435	44.565
3	2	30.000	19.029	13.971	4	60.000	33.829	26.171
4	3.5	52.000	23.079	28.921	7	105.000	31.713	73.287
5	3	45.000	24.501	20.499	5	75.000	32.176	42.824
6	3	45.000	23.477	21.523	5	75.000	33.677	41.323
7	3	45.000	23.357	21.643	6	90.000	40.957	49.043
8	3	45.000	27.655	17.345	5.5	82.500	41.080	41.420
9	3	45.000	27.780	17.220	4.5	67.500	40.080	27.420
10	2	30.000	25.713	4.287	4.5	67.500	38.913	28.587

No	Sebelum				Setelah			
	Produksi (Kg)	Penerimaan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pendapatan (Rp)	Produksi (Kg)	Penerimaan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	3.5	52.500	23.641	28.859	4.5	67.500	23.919	43.581
2	3.5	52.500	23.641	28.859	4.5	67.500	23.919	43.581
3	3.5	52.500	23.641	28.859	4.6	69.000	23.919	45.081
4	3.5	52.500	23.780	28.720	4.6	69.000	24.094	44.906
5	3	45.000	24.715	20.285	4.1	61.500	24.094	37.406
6	3	45.000	24.455	20.545	4	60.000	24.769	35.231
7	3	45.000	23.912	21.088	4	60.000	24.226	35.774
8	3.5	52.500	23.912	28.588	4.5	67.500	24.226	43.274
9	3.5	52.500	26.884	25.616	4.6	69.000	27.198	41.802
10	3.5	52.500	26.884	25.616	4.6	69.000	27.198	41.802

B. Nelayan yang Tidak Berkelompok

No	Sebelum				Setelah			
	Produksi (Kg)	Penerimaan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pendapatan (Rp)	Produksi (Kg)	Penerimaan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	3.5	52.500	29.308	23.192	4.6	69.000	28.336	40.664
2	3	45.000	29.308	15.692	4	60.000	28.336	31.664
3	3	45.000	27.372	17.628	4	60.000	26.400	33.600
4	3.5	52.500	27.504	24.996	4.5	67.500	26.532	40.968
5	3	45.000	27.504	17.496	4.1	61.500	26.532	34.968
6	3	45.000	27.868	17.132	4.1	61.500	26.896	34.604
7	3	45.000	27.868	17.132	4	60.000	26.896	33.104
8	3	45.000	30.168	14.832	4	60.000	29.196	30.804
9	3	45.000	29.672	15.328	4	60.000	28.700	31.300
10	3.5	52.500	29.308	23.192	4	60.000	28.336	31.664

Lampiran 6 : Peningkatan Pendapatan Nelayan

A. Nelayan yang Berkelompok

No	Pendapatan		Peningkatan Pendapatan
	Sebelum	Setelah	
1	883.800	1.324.800	441.400
2	670.950	886.950	216.000
3	419.130	695.130	276.000
4	867.630	1.298.610	430.980
5	614.970	837.720	222.750
6	645.690	789.690	144.000
7	649.290	796.290	147.000
8	520.350	972.600	452.250
9	615.600	732.600	117.000
10	128.610	317.610	189.000

No	Pendapatan		Peningkatan pendapatan
	Sebelum	Setelah	
1	577180	871620	294440
2	577180	871620	294440
3	577180	901620	324440
4	574400	898120	323720
5	405700	748120	342420
6	410900	704620	293720
7	421760	715480	293720
8	571760	865480	293720
9	512320	836040	323720
10	512320	836040	323720

B. Nelayan yang Tidak Berkelompok

No	Pendapatan :		Peningkatan Pendapatan
	Sebelum	Setelah	
1	463840	813280	349440
2	313840	633280	319440
3	352560	672000	319440
4	499920	819360	319440
5	349920	699360	349440
6	342640	692080	349440
7	342640	662080	319440
8	296640	616080	319440
9	306560	626000	319440
10	463840	633280	169440

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
SEBELUM	601.6020	10	216.9044	68.5912
SETELAH	865.2000	10	292.2425	92.4152

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
SEBELUM & SETELAH	10	.910	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences					t
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		
				Lower	Upper	
SEBELUM - SETELAH	-263.5980	130.8605	41.3817	-357.2100	-169.9860	-6.370

Paired Samples Test

	df	Sig (2-tailed)
SEBELUM - SETELAH	9	.000



t-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SEBELUM	373.2400	10	73.9000	23.3692
	SETELAH	686.6800	10	73.7953	23.3361

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SEBELUM & SETELAH	10	.747	.013

Paired Samples Test

		Paired Differences					
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		
					Lower	Upper	
Pair 1	SEBELUM - SETELAH	-313.4400	52.5357	16.6132	-351.0218	-275.8582	-1

Paired Samples Test

		df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	SEBELUM - SETELAH	9	.000

t-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SEBELUM	512.0700	10	72.7762	23.0139
	SETELAH	824.8760	10	74.4183	23.5331

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SEBELUM & SETELAH	10	.972	.000

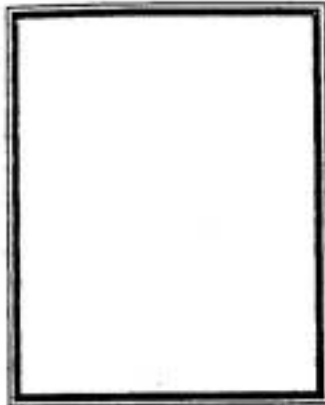
Paired Samples Test

		Paired Differences					t
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		
					Lower	Upper	
Pair 1	SEBELUM - SETELAH	-312.8060	17.6462	5.5802	-325.4293	-300.1827	-56.05

Paired Samples Test

		df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	SEBELUM - SETELAH	9	.000

RIWAYAT HIDUP



MARLIANY WIDIANINGSI dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 14 Maret 1983. Penulis adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara, pasangan ayahanda Drs. Abd. Madjid (Alm) dan ibunda

Nurliah Nurdin Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Tidung tahun 1995. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Neg 13 Makassar pada tahun 1998. Pendidikan sekolah Lanjutan Tingkat Atas di SMU Neg 03 Makassar pada tahun 2001. Selanjutnya diterima di Universitas Hasanuddin pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).